

Tabel 2.75 Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
Potensi Daerah				
1. Sumber Daya Alam (SDA)				
a. Pariwisata				
1	Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang disebabkan oleh:	Isu KLHS	Isu Strategis Transformasi Ekonomi	
a)	Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan;	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
b)	Kurang optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan
c)	Rendahnya kualitas sumber daya manusia terampil yang terlatih untuk pengembangan pariwisata;	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
d)	Industri pariwisata belum berkembang secara merata pada setiap destinasi wisata;	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan.		
e)	Kurang optimalnya kerja sama antardaerah dalam pengembangan pemasaran pariwisata melalui penyediaan paket-paket wisata antardaerah;		4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
f)	Belum meratanya infarstuktur yang mendukung pariwisata berupa aksesibilitas, konektivitas, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata; dan	Isu Global	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
g)	Masih terbatasnya informasi pariwisata akibat terbatasnya pusat-pusat informasi pariwisata (<i>Tourism Information Center-TIC</i>).	Pembangunan infrastruktur yang solid, inovatif, dan berorientasi pada industri berkelanjutan; Perlindungan dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya laut daratan.	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana.
2	Kurang optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.	Isu Nasional	2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi
		Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi pengembangan destinasi wisata baru yang tidak merusak lingkungan, pengelolaan limbah pariwisata yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan.	3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
		Isu Regional	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
		Pengembangan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional.	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja antar daerah/kolaborasi (hexa helix).
			2	Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
Potensi Daerah				
2. Ekonomi				
a. Ekonomi Kreatif (Kriya, Kuliner, Fashion)				
1	Kurang optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kreatif akibat:	Isu KLHS	Isu Strategis Transformasi Ekonomi	
a)	Kurang optimalnya sumber daya manusia yang trampil, kreatif dan inovasi serta rendahnya literasi wirausaha termasuk kemampuan teknologi yang belum optimal;	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
b)	Kurang optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif dan manajemen pengelolaan usaha;	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
c)	Masih lemahnya perlindungan terhadap produk usaha ekonomi kreatif melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual hasil budaya tradisonal;	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar; dan
d)	Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih lemah dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual;	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan.	4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan.
e)	Rendahnya akses permodalan yakni, terbatasnya akses pada pembiayaan atau modal untuk usaha kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif; dan	Isu Global	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	
f)	Kurangnya adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan distribusi.	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
			2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
			3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
2	Kurang optimalnya promosi dan pemasaran produk kreatif dari NTT dengan memanfaatkan pasar digital.	Pengelolaan daratan yang berkelanjutan,	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
3	Kurang optimalnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Pemulihan lahan terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati; dan		
		Pengurangan emisi gas rumah kaca, Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana.		
		Isu Nasional		
		Kerawanan pangan; Ekosistem terdegradasi; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim.		
		Isu Regional		
		Pengembangan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional; dan		
		Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi, Daerah Tertinggal.		

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
Potensi Daerah				
3. Sektor Produktif				
a. Sektor Pertanian dan Perkebunan				
1	Kurang optimalnya produksi dan produktivitas sektor primer yang disebabkan oleh:	Isu KLHS	Isu Strategis Transformasi Ekonomi	
2	Pola pertanian, peternakan, dan perikanan masih bersifat subsisten, belum berorientasi komersil.	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;
3	Kurang optimalnya adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan;	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
4	Dominasi petani gurem dimana, pusat-pusat produksi pertanian masih sporadis dan dalam skala kecil	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
5	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sektor primer.	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	4	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
6	Lemahnya rantai pasok dalam sistem agribisnis yakni, penyediaan dan akses terhadap sarana produksi utama dalam sistem agribisnis di NTT masih lemah.	Isu Nasional	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	
7	Kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi.	Kerawanan pangan; Ekosistem terdegradasi; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
			2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
			3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
8	Kurang optimalnya penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan.	Isu Regional	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
9	Keselerasan hubungan hulu-hilir (produsen dan pengguna produk pertanian dan perikanan) yang belum terjalin.	Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi; Daerah Tertinggal	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / <i>hexa helix</i>
10	Ancaman hama penyakit yang berdampak luas, khususnya ASF pada ternak babi dan hama belalang kembara (<i>locusta migratoria manilensis meyen</i>).		2	Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
11	Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan masa tanam sehingga menyebabkan fenomena gagal panen.			
12	Jaringan irigasi yang tidak efisien di sentra produksi padi (sawah).			
Potensi Daerah				
b. Sektor Peternakan				
1	Sistem pemeliharaan ternak sebagian besar masih konvensional	Isu KLHS	Isu Strategis Transformasi Ekonomi	
2	Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak (sapi potong,sapi Perah, kerbau, kambing, domba,babi,	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah,

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
3	Ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
4	Penurunan kualitas bibit ternak	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
5	Masih adanya kasus penyakit hewan menular strategis	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
6	Masih adanya produk hewan yang beredar belum memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner	Isu Global	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	
		Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
			2	Peningkatan Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi
			3	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan
		Isu Nasional	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
		Peningkatan produksi pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; penyediaan benih dan bibit seta peningkatan produksi ternak; peningkatan kesehatan masyarakat veteriner; pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / <i>hexa helix</i>
		Isu Regional	2	Peningkatan efektifitas,

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
		Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Swasembada Air dan Energi; Daerah Tertinggal		akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
Potensi Daerah				
c. Sektor Kelautan dan Perikanan (Rumput Laut, Garam, Perikanan Tangkap, Budidaya Air Tawar				
1	Terbatasnya Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola;	Isu KLHS	Isu Strategis Transformasi Ekonomi:	
2	Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya; dan	Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah,
3	Masih rendahnya angka konsumsi ikan.	Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;
a.	Garam	Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;	3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
1	Teknologi Produksi yang Tradisional: Sebagian besar petani garam masih menggunakan metode tradisional (solar evaporation), yang bergantung pada cuaca sehingga produksi tidak stabil, terutama saat musim hujan;	Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan
2	Kualitas Garam yang Rendah: Garam rakyat seringkali mengandung kadar NaCl rendah dan pengotor (kotoran, logam berat) karena kurangnya proses pemurnian, sehingga kurang bersaing di pasar industri;	Isu Global	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
3	Infrastruktur yang Tidak Memadai: Minimnya lahan garam (tambak) yang berkualitas, akses air laut yang terbatas, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan garam modern;	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak	1	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana
4	Pasar dan Harga yang Tidak Stabil: Petani garam seringkali kesulitan memasok ke industri besar karena ketidaksesuaian standar mutu, sehingga harga jual rendah dan dikuasai oleh tengkulak; dan	Pengelolaan daratan yang berkelanjutan	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
5	Dampak Perubahan Iklim: Cuaca ekstrem (hujan berkepanjangan atau kemarau panjang) mengganggu proses kristalisasi garam.	Pemulihan lahan terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati	1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja kolaborasi / <i>hexa helix</i>
b.	Rumput Laut	Pengurangan emisi gas rumah kaca, Adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana	2	Peningkatan efektifitas, akutanabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
1	Serangan Hama dan Penyakit: Budidaya rumput laut rentan terhadap hama seperti ice-ice dan parasit yang menurunkan kualitas produksi;			
2	Teknik Budidaya yang Masih Sederhana: Mayoritas petani menggunakan metode tali panjang (long line) tanpa penerapan teknologi yang meningkatkan produktivitas;			
3	Pasca Panen yang Minim Pengolahan: Rumput laut NTT umumnya dijual dalam bentuk kering tanpa nilai tambah (hanya bahan mentah), sehingga harga jual rendah. Minimnya industri pengolahan rumput laut di lokal;	Penangkapan ikan terukur; budidaya laut, pesisir dan payau; pengolahan sampah plastik di laut		

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
4	Akses Pasar yang Terbatas: Ketergantungan pada pasar ekspor (seperti China) membuat harga fluktuatif. Selain itu, rantai distribusi yang panjang mengurangi keuntungan petani;	Isu Regional		
5	Perubahan Lingkungan: Degradasi kualitas perairan akibat sedimentasi dan aktivitas manusia mempengaruhi pertumbuhan rumput laut.	Pengembangan Kawasan Potensial Swasembada Pangan, Sentra Produksi Garam, Sentra produksi rumput laut		
4. Potensi Sumber Daya Manusia				
1	Masih tingginya prevalensi Stunting, AKI, AKB,Gizi buruk;	Isu KLHS	Isu Strategis Transformasi Sosial	
2	Masih rendah kualitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat;	Isu Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas, Inklusif dan Merata;	1	Kurang Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan;
3	Kurang optimalnya kapasitas aparatur pemerintah; dan	Isu Good Governance dan Akses Pelayanan Publik yang Belum Optimal.	2	Kurang Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial
4	Terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok rentan (Disabilitas, lansia dll)	Isu Pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) dan Perlindungan Anak serta Perempuan	3	Kurang optimalnya pembangunan Gender, Equalitas, Disabilitas, dan Social Inklusi (GEDSI)
		Isu Global	Isu Strategis Transformasi Tata Kelola	
		Tanpa kemiskinan,	1	Peningkatan efektifitas, akutanabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik,
		Tanpa kelaparan		
		Kehidupan sehat dan sejahtera		
		Pendidikan berkualitas		
		Kesetaraan gender		

No	Permasalahan	Isu Lingkungan Dinamis	Isu Strategis Daerah	
		KLHS/Global/Nasional/Regional		
		Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi		manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan
		Isu Nasional		
		Kesehatan untuk semua	2	Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
		Pendidikan berkualitas yang merata		
		Perlindungan sosial yang adaptif		
		Isu Regional		
		Dukungan bagi pembangunan Daerah Tertinggal		

Dengan demikian, persandingan isu strategis dan Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.76 Persandingan Isu Strategis Daerah dan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Isu Strategis Daerah		Misi
VISI : “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”		
Isu Strategis Transformasi Ekonomi		
1	Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;	Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju) Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera) Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
2	Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan;	
3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar; dan	
4	Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi dan swasembada pangan.	
Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi		
1	Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi;	Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (Maju) Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera) Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
2	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan; dan	
3	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana.	
Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		
1	Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah melalui kerja antar daerah/kolaborasi (hexa helix); dan	Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (Maju)

Isu Strategis Daerah		Misi
2	Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.	Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
Isu Strategis Transformasi Sosial		
1	Kurang Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan;	Misi III: Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (Cerdas)
2	Kurang Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial; dan	Misi II: Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (Sehat)
3	Kurang optimalnya pembangunan Gender, Equalitas, Disabilitas, dan Social Inklusi (GEDSI).	Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera) Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)
Isu Strategis Transformasi Tata Kelola		
1	Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan; dan	Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (Sejahtera)
2	Kurang Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang Inklusif (Berkelanjutan)

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu E. Melkiades Lakalena dan Johni Asadoma menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, adalah :

“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pernyataan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut:

Makna NTT Maju : Kemajuan yang mencakup berbagai aspek di Nusa Tenggara Timur, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan NTT sebagai provinsi yang maju dan berkarakter. Memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

Makna Filosofisnya: Kemajuan adalah gerak menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Makna NTT Sehat : Upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur serta Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.

Makna Filosofisnya: Kesehatan adalah pondasi kehidupan, tubuh yang sehat menciptakan masyarakat yang kuat.

Makna NTT Cerdas : Berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan inovatif.

Makna Filosofisnya: Kecerdasan bukan sekedar ilmu melainkan kebijaksanaan dalam bertindak demi kebaikan bersama

Makna NTT Sejahtera : Membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Makna Filosofisnya: Kesejahteraan tercapai saat semua warga hidup layak

dan saling menguatkan dalam keadilan

Makna NTT Berkelanjutan : Keberlanjutan bukan hanya soal mempertahankan kebijakan, tetapi tentang membangun ekosistem yang mampu berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Keberlanjutan berarti memastikan bahwa setiap kemajuan yang kita capai baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial tidak sekedar bertahan tetapi juga memperkuat masyarakat agar tidak terus menerus bergantung pada intervensi pemerintah sehingga menciptakan inisiatif yang tumbuh berkembang dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Makna Filosofisnya: Keberlanjutan adalah warisan bumi, budaya dan kemanusiaan yang akan tetap lestari.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
2. Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS);
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses serta Kualitas Hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA); dan
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

1) Keselarasan Sasaran, Indikator, Visi dan Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 hanya menetapkan baseline Tahun 2025 dan target tahun 2045 sehingga RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 berkewajiban untuk menetapkan target pada periode pertama RPJPD yaitu Tahun 2025-2029 seperti persandingan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Persandingan Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 -2029

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 -2029						
		Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	• PDRB per kapita (Rp Juta)	24,57 - 24,85	154,72 - 176,22	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85-25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
	• Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI/Poin)	60,41	233,21	NA	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
	• Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	1,31 - 1,34	2,25 - 2,76	2,46	1,31 - 1,34	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	• Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 – 15,82	0,01-1,01	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
	• Rasio Gini (Indeks)	0,319 – 0,324	0,257 – 0,308	0,316	0,309-0,315	0,302-0,308	0,295-0,301	0,288-0,295	0,281-0,287	0,274-0-280
	• Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,62	0,79	NA	0,62	0,6285	0,637	0,6455	0,654	0,6625
	• Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75-5,65	6,21-7,63	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	• Indeks Daya Saing Daerah	3,20 (2022)	3,9 – 4,45	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 -2029						
		Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,47	0,72	0,48	0,487	0,493	0,500	0,506	0,513	0,519
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,82	98,59	53,27	61,82	63,19	64,57	69,07	70,26	71,45
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	80,02	86,31	74,42	80,02	80,19	80,35	80,52	80,69	80,85

Sumber : RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dan Olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Visi RPJMD NTT 2025-2029 tidak terlepas dari visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTT 2025-2045. Tabel di bawah ini menjelaskan hubungan logis antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045.

Tabel 3.2 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Visi RPJMD 2025-2029		Visi RPJPD 2025-2045
NTT Maju Sehat Cerdas, Sejahtera Dan Berkelanjutan	selaras	Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Misi RPJMD 2025-2029		Misi RPJPD 2025-2045
Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (MAJU)	selaras	Misi 2: Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Misi 4: Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah
Misi II: Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (SEHAT)	selaras	Misi 1 : Membangun Sumberdaya manusia yang berdaya saing dan terlindungi hak dasarnya. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah
Misi III: Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (CERDAS)	selaras	Misi 1 : Membangun Sumberdaya manusia yang berdaya saing dan terlindungi hak dasarnya. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah.

Misi RPJMD 2025-2029		Misi RPJPD 2025-2045
Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	selaras	Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahan Sosial Budaya dan Ekologi. Misi 4: Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan masa depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	selaras	Misi 3: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif. Misi 4: Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi. Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahan Sosisal Budaya dan Ekologi. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Sumber : olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa persandingan antara Visi kedua dokumen selaras untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang maju, berdaulat yang mengutamakan asas kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, dimana RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 lebih luas cakupannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan mengusung 8 (delapan) misi misi yang mencakup Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Hukum, Pembangunan Inklusif, Pembangunan Kewilayahan, Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan dan Kestinambungan Pembangunan Daerah. Sedangkan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari RPJPD hanya difokuskan pada 5 (lima) aspek antara lain; Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan, Sumber Daya Alam. Dengan demikian, setiap misi RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045.

2) Keselarasan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi RPJMN 2025-2045 sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. Visi RPJMN 2025-2029

: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.**
2. Visi RPJMD 2025-2029

: **NTT Maju, Sehat Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.**

Tabel keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN sebagai berikut.

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (MAJU)	Misi II : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
	Misi III : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi II : Memperluas Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inklusif, Terjangkau Dan Mudah Diakses (SEHAT)	Misi I : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
	Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (CERDAS)	Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (CERDAS)	Misi VIII : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi IV : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, Serta Kualitas Hidup Yang Berkeadilan Dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)	Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	Misi I : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Misi VII: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Misi VIII: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber : olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

3) Keselarasan Misi RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015-2029

Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals/SDGs* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menguraikan 17 (tujuh belas) tujuan dari implementasi TPB yang termasuk dalam sasaran nasional RPJMN Tahun 2025-2029 di Indonesia.

Pada Tabel 3.4 menggambarkan keselarasan antara Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015-2029. Keselarasan ini menunjukkan komitmen

pemerintah daerah dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan sekaligus mencerminkan integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut penjelasan rincinya:

1. Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (MAJU)

Misi ini selaras dengan beberapa tujuan SDGs, antara lain:

- **Tanpa Kemiskinan** : Pembangunan infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing daerah;
- **Tanpa Kelaparan** : Infrastruktur yang memadai mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan;
- **Air Bersih dan Sanitasi Layak** : Misi ini mencakup penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
- **Energi Bersih dan Terjangkau** : Pembangunan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan;
- **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** : Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja produktif;
- **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur** : Fokus pada pembangunan infrastruktur tangguh dan peningkatan inovasi;
- **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** : Menciptakan kota inklusif, aman, dan berkelanjutan; dan
- **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** : Mendorong pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

2. Misi II: Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah Diakses (SEHAT)

Misi ini sejalan dengan tujuan SDGs :

- **Kehidupan Sehat dan Sejahtera** : Memastikan akses layanan kesehatan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** : Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang baik mendukung produktivitas tenaga kerja.

3. Misi III: Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (CERDAS)

Misi ini berkaitan dengan tujuan SDGs:

- **Pendidikan Berkualitas** : Menjamin pendidikan inklusif, merata, dan berkesempatan belajar sepanjang hayat; dan
- **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur** : Pendidikan berkualitas mendorong inovasi dan pengembangan SDM unggul.

4. Misi IV: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)

Misi ini selaras dengan tujuan SDGs:

- **Kesetaraan Gender** : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- **Berkurangnya Kesenjangan** : Mengurangi kesenjangan intra-daerah dan antar-daerah;

- **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** : Meningkatkan kualitas hidup yang inklusif; dan
- **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** : Mendorong pola hidup berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)

Misi ini mencakup banyak aspek SDGs, seperti:

- **Penanganan Perubahan Iklim** : Tindakan cepat untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- **Ekosistem Laut** : Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan;
- **Ekosistem Daratan** : Restorasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem daratan;
- **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**: Mewujudkan masyarakat inklusif dan damai; dan
- **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** : Revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, maka penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan 5 (lima) misi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029**

Misi RPJMD Tahun 2025-2029/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029							
Misi I : Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang berdaya saing (MAJU)							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi II : Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (SEHAT)							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun		Tujuan 2 Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia			Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)							
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan :Mengakhiri Kemiskinan	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan			Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kesempatan Kerja		Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta

Misi RPJMD Tahun 2025-2029/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2015-2029								
dalam segala bentuk dimanapun	meningkatkan pertanian	Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			Mendorong Inovasi		
Misi IV : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)								
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan :Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Tujuan 5 Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan antar Negara	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan		Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan dasa depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN)								
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Tujuan 14 Ekosistem Laut : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan 15 Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan satu atau lebih TPB/SDGs. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda global, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi panduan pembangunan daerah, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pencapaian TPB/SDGs.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT Tahun 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045 melalui RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan Visi **“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”** pada periode 2025–2030, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi landasan pencapaian pembangunan daerah. Sasaran-sasaran tersebut dirumuskan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah sasaran visi yang akan dicapai :

1. MAJU

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dengan target rata-rata 8% per tahun, didorong oleh penguatan sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang yang berkelanjutan, termasuk jalan, air bersih, listrik, dan jaringan digital, guna mengurangi kesenjangan antarwilayah; dan

- Menciptakan 50.000 lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta program kewirausahaan yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda dan perempuan.

2. SEHAT

- Menurunkan prevalensi stunting secara signifikan hingga di bawah 20% melalui intervensi terpadu di bidang kesehatan, gizi, dan sanitasi, dengan fokus pada penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan;
- Meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 95% penduduk NTT untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau; dan
- Memperluas dan memodernisasi fasilitas kesehatan dasar, termasuk pembangunan 100 Puskesmas baru serta peningkatan kompetensi tenaga medis dan kader kesehatan.

3. CERDAS

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT hingga 72 melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik;
- Mengembangkan 20 sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja (*link and match* dengan kebutuhan industri); dan
- Memastikan 90% sekolah di NTT memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta didukung oleh tenaga pengajar yang tersertifikasi.

4. SEJAHTERA

- Menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 15% melalui pendekatan graduasi dengan mengintegrasikan program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian yang meliputi akses permodalan dan transfer aset, pemberdayaan sosial yang meliputi penguatan efikasi, motivasi dan pendampingan intensif dan inklusi keuangan dengan prioritas masyarakat desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN);
- Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 15% per tahun dengan mendorong produktivitas sektor riil dan perluasan kesempatan kerja; dan
- Memastikan 100% pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

5. BERKELANJUTAN

- Menerapkan prinsip infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*) dalam 70% proyek pembangunan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim;
- Melestarikan 30% kawasan konservasi serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi masyarakat; dan
- Mewujudkan NTT Digital dengan menyediakan akses internet merata di 100% desa/kelurahan guna mendukung pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik berbasis teknologi.

6. KOLABORASI DAN SINERGI

- Melibatkan diaspora NTT dan sektor swasta dalam 80% program pembangunan melalui inisiatif seperti platform “Ayo Bangun NTT!” dan kemitraan strategis; dan
- Menyelaraskan 100% program pemerintah kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan.

Dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjadi wilayah yang unggul, mandiri, dan berkeadilan, sekaligus meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi sebagai berikut:

Tabel 3.5 Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: NTT Maju Sehat Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan										
Misi 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)										
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera										
T.1.1	Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur (Poin)		7,65	17,65	27,65	37,65	47,65	57,65	67,65
S.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, transportasi, pertanahan dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (<i>green and blue infrastructure</i>), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim									
S.1.1.1.A	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah	a.	Penyediaan Infrastruktur Transportasi (Poin)	11,85	25,57	22,23	24,17	26,12	28,06	30
S.1.1.1.B	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	a	Cakupan Layanan Air Minum Layak (%)	88.55	88,75	88,95	89,15	89,35	89,55	89,75
		b	Cakupan Layanan Air Minum Aman (%)	N.A	19.05	21.24	23.43	25.62	27.81	30.00
		c.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	N.A	34.36	37.42	40.924	44.206	47.48	50.77
		d	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N.A	0,04	0.44	0.85	1.25	1.662	2.067
S.1.1.1.C	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	a	Rasio Elektrifikasi (%)	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		b	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	211,22	216,02	220,82	225,62	230,42	235,22	240,02
		c	Intensitas Energi Primer (SBN/Rp Miliar)	80,32	79,51	78,70	77,89	77,08	76,27	75,45
		d	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
S.1.1.1.D	Tersedianya Rumah Layak Huni yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan	a	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N.A	2,5	4.88	7.38	9.75	12.13	14.50
		b	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N.A	5.00	9,25	13,5	17,75	22.00	26,25
		c.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	0.00	15.00	19.25	23.50	27.75	32.00	36.25
		d	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	46.88	50.76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
		e.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi (Poin)	36,9	38,9	46,9	51,9	56,9	61,9	66,9
S.1.1.1.E	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) dan ekonomi biru (<i>blue economy</i>)	a.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (poin)	N.A	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505
		b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	74,42	80,02	80,18	80,35	80,52	80,69	80,85

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.1.1.1.F	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	131,85	186,87	185,48	184,09	182,70	181,32	179,93
		b.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	19,85	19,85	20,55	21,30	22,14	23,08	23,85
		c.	Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	34,27	34,27	38,38	39,01	40,67	41,12	41,77
		d.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	53,27	61,82	63,19	64,57	69,07	70,26	71,45
		e.	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
S.1.1.2	Meningkatnya daya saing antar wilayah	a.	Indeks Kemahalan Konstruksi	93,58	92,78	92,22	91,67	91,11	90,56	89,99
		b.	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	N.A	11,49	11,21	10,93	10,65	10,37	10,09
		c.	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	N.A	46,09	46,111	46,132	46,153	46,174	46,195
		d.	Persentase Desa Mandiri (%)	1.78	2.42	3.06	3.69	4.33	4.97	5.61
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar										
T.1.2	Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital	Indeks Masyarakat Digital (Poin)		42,32	47,21	52,1	56,99	61,88	66,77	71,66
S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	a.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	N.A	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)										
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting										
T.2.1	Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)		95	100	100	100	100	100	100
S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses.	a	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
		b.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	103	101	99	97	95	93	91
		c.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	11	10	9	8	7	6	5
		d.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	7,85	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
		e.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,71	2,70	2,67	2,63	2,60	2,56	2,53
		f.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	56	59	68	72	77	81	85
		g.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	87	90	90	90	90	90	90
S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan hexahelix	a.	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	37	33,1	31,9	30,7	29,5	28,38	27,1
S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan	a.	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif (%)	95	96	97	98	99	100	100

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S.2.1.4	Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT	a.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	80	80	85	90	95	100	100	
		b.	Cakupan kabupaten/kota yang sudah memenuhi <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
S.2.1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM	a.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	35	37	40	43	45	48	50	
		b.	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	55	60	65	70	75	80	90	
Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)											
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi											
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan											
T.3.1	Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran	Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan (%)		58,35	100	100	100	100	100	100	
S.3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang inklusif dan holistik integratif	a.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,02	8,61-8,62	8,49	8,38	8,27	8,15	8,04	
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	N.A	13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81	
		c.	Skor Kemampuan Literasi								
			- SMA	63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94	
			- SMK	58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33	
			- SDLB	52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95	

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- SMPLB	61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
			- SMALB	57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
		d.	Skor Kemampuan Numerasi							
			- SMA	53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
			- SMK	50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
			- SDLB	47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
			- SMPLB	55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
			- SMALB	52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
		e.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	N.A	10,53	10,60	10,68	10,76	10,85	10,92
T.3.2	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (poin)		53,69	54,89	56,09	57,29	58,49	59,69	60,89
S.3.2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata	a.	Persentase Dimensi Pendidikan dalam Pembangunan Kebudayaan	70,21	72,58	73,9	75,18	76,49	77,79	79,09
Misi 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)										
Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal										
T.4.1.	Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan	Indeks Desa (nilai)		0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun	a.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85-25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
		b.	Gini Ratio (0-1)	0,316	0,309-0,315	0,302-0,308	0,295-0,301	0,288-0,295	0,281-0,287	0,274-0-280
		c.	Tingkat Kemiskinan	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 - 18,12	16,74 - 17,50	16,05 - 16,88	15,36 - 16,26
S.4.1.2	Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,46	1,31	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
		b.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi (%)	N.A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
		c.	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi (%)	N.A	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44
		d.	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)	86,17	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22
		e.	Persentase Desa Mandiri (%)	1,78	2,42	3,06	3,69	4,33	4,97	5,61
S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	a.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,11	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88
		b.	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)	22,00	26,00	27,00	28,00	30,00	35,00	40,00
		c.	Tingkat Digitalisasi Koperasi	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	60,00
		d.	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)	77,81	77,63	75,00	77,00	80,00	81,00	85,00

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.4.2	Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		N.A	60,1 - 60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11
S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal	a.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
S.4.2.2	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	55.86	56.30	56.84	57.36	57.89	58.27	58,86
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)										
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan , Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi										
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman										
T.5.1	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
S.5.1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	a.	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	12,49	11,85	11,22	10,58	9,94	9,30	8,67
		b.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	N.A	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
		c.	Indeks Ketahanan Pangan	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
		d.	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
		e.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	89	89	90	90	91	91	92
		f.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100	100	101	101	102	102	103
S.5.1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah.	a.	Tingkat Inflasi (%)	N.A	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
		b.	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
		c.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-37,52	-34,56	-31,60	-28,64	-25,68	-22,72	-19,76

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.5.2	Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		3,02	2,49 - 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2,10-2,79	2,00 – 2,74
S.5.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,50	78,60	79,70	80,80	81,90	83,00	84,10
		b.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N.A	73,63	74,45	75,27	76,09	76,91	77,73
S.5.2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	a.	Proporsi jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) pada Level Provinsi	N.A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
		b.	Inklusi Keuangan (%)	N.A	92,07	92,41	92,76	93,11	93,45	93,80
		c.	Proporsi Jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) pada level Provinsi	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal										
T.5.3	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)		8,49	8,52	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	a.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7,77	7,77	7,80	7,84	7,90	7,95	8,00
S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif	a.	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	0,72	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat										
T.5.4	Terwujudnya perlindungan bagi seluruh tenaga kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatnya cakupan perlindungan Tenaga Kerja NTT melalui kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan (%)		N.A	64,82	73,81	75,16	76,51	77,87	79,22
S.5.4.1	Jaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.	a.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) (%)	N.A	28,42	30,62	32,81	35,01	37,21	39,40
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia										
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin										
T.5.5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	Indeks Pelayanan Publik (poin)		3,56	3,66	3,73	3,80	3,87	3,94	4,00
S.5.5.1	Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani	a.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (poin)	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82
		b.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor/Nilai)	3,87/ N.A	3,87/ N.A	3,89/ 1,7	3,91/ 1,7	3,95/ 1,9	4,0/ 1,9	4,1/ 2
		c.	Indeks Integritas nasional (poin)	N.A	65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95
		d.	Persentase penegakan hukum peraturan daerah (%)	N.A	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50
		e.	Indeks Kapabilitas APIP (poin)	3.09	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27
		f.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		g.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (poin)	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
S.5.5.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	a.	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	N.A	2,36	2,48	2,60	2,72	2,84	2,96
		b.	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	30,21	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.5.5.3	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor	a.	Indeks Reformasi Hukum (poin)	N.A	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
		b.	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	N.A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
		c.	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	N.A	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
		d.	Indeks Demokrasi Provinsi (poin)	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12
		e.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	N.A	15,00	16,5	18,00	19,5	21,00	22,5
		f.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	68,86	70,12	70,93	71,75	72,56	73,38	74,19
		g.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	84,25	86,46-86,51	86,87-86,94	87,28-87,37	87,69-87,80	88,10-88,23	88,51-88,67

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Adapun penetapan strategi dan arah kebijakan ini mengarah pada penerapan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan arahan umum terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi NTT, GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi NTT, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Provinsi NTT

VISI: NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)							
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi							
Cita 7: Jalan, air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera							
T.1.1	Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan	S.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, transportasi, pertanahan dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (<i>green and blue infrastructure</i>), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim.				
		S.1.1.1.A	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan melalui optimalisasi kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial, serta meningkatkan kemantapan Jalan sampai ke pelosok sesuai prioritas dan program unggulan daerah dan bersinergi dengan program strategis nasional dan kabupaten/kota.	-	Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. Upaya pengalihan status ruas jalan Provinsi pada kawasan perbatasan negara yang masih merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Nasional. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan). Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi.
		S.1.1.1.B	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air		Meningkatkan kemitraan dalam pendayagunaan dan kelestarian sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi menuju ketahanan air termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.	-	Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih.
						-	Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum - Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga - Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah - Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air - Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air.
		S.1.1.1.C	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan listrik yang merata dan berkelanjutan berbasis Energi Baru Terbarukan menuju Swasembada Energi.	- Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik - Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN - Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan - Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas - Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu <i>Timor Biomass Island, Flores Gheothermal Island, Sumba Iconic Island</i>, serta potensi gelombang laut, arus laut temperatur laut dan hidrogen hijau Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi.
		S.1.1.1.D	Tersedianya Rumah Layak Huni yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman dan berkelanjutan melalui pembangunan rumah bersanitasi layak yang terintegrasi dengan PSU termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.	Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu
		S.1.1.1.E	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan,berketahanan iklim dan resiliensi terhadap bencana	Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			melalui penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) dan ekonomi biru (<i>blue economy</i>)		keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh) Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, insentif fiskal yang terarah serta stabilitas sosial/politik guna mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan dan inklusif.
		S.1.1.1.F	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim		Mitigasi krisis keanekaragaman hayati dengan menurunkan tingkat keterancaman spesies dan ekosistem melalui perlindungan habitat alami dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.
					Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi. Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim dan tanggap terhadap resiko bencana. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					(iv) pengembangan restorasi ekosistem di lahan terdegradasi, hutan dan sumber daya air. (v) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana. Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi.
					Pemulihan dan pengurangan lahan kritis secara bertahap, melalui rehabilitasi lahan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan penghidupan masyarakat. Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi Optimalisasi inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi per sektor secara terukur untuk mendukung penurunan emisi GRK dan pencapaian target pembangunan rendah karbon. Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					- Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.
		1.1.2	Meningkatnya daya saing antar wilayah	Meningkatkan pengembangan Pusat Pertumbuhan yang terintegrasi melalui peningkatan kemitraan dalam pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, terutama wilayah strategis dan daerah afirmasi secara merata dan berkelanjutan. - Meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi dan <i>multiplier effect</i> serta akselerasi pembangunan industri.	Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis. - Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu. Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok. Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar							
T.1.2	Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital	S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	-	Meningkatkan kemitraan dalam penguatan Infrastruktur TIK/Digital Berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat.	-	Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
				-	Meningkatkan literasi difital dan akses teknologi informasi bagi seluruh penduduk khusus perempuan untuk mendukung partisipasi inklusif dan ekonomi digital.	-	Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi
				-	Meningkatkan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan teknologi digital yang adaptif dalam mendukung Pelayanan Publik dan Percepatan Pembangunan.	-	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						-	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan <i>Smart Village</i> dan <i>Smart City</i> melalui: (i) Penetapan Pilot Project Desa Digital (ii) Pengembangan Big Data dan <i>Artificial Intelligence</i> untuk Kebijakan Publik
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)							
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi							
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting							
T.2.1	Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
		a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	-	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	-	Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan <i>one health</i> , termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi
				-	Meningkatkan layanan promotif, pencegahan dan penyediaan layanan bagi lansia yang terjangkau dan inklusif.	-	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
						-	Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi)

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan.
		S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan hexahelix	Meningkatkan kolaborasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting untuk menciptakan masyarakat sehat dan bebas stunting	-	Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix
		S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan			
		a.	Infrastruktur di Fasilitas Layanan kesehatan	Pengembangan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas.	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas.
		S.2.1.4	Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT			
		a.	Seluruh Masyarakat NTT menjadi peserta aktif BPJS	Pengembangan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan seperti PKRT, disabilitas, lansia, anak memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau	-	Upaya pencapaian <i>Univeral Health Coverage</i> (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN.
		S.2.1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan			

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		a.	Peningkatan Distribusi Tenaga Kesehatan	Meningkatkan pemerataan penyebaran dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil	-	Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil)
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)						
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi						
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan						
T.3.1	Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran	S.3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau dengan afirmasi keadilan gender dan memperhatikan pengembangan di daerah afirmasi.	-	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif (PAUD HI); (ii) Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat <i>Drop Out</i> (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan. - Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus; - Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus;

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					- Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan ; - Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan ; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran . - Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap <i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (GEDSI)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial meliputi: penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif, penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif.
				- Memastikan pengintegrasian program. Kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan di sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi - Meningkatkan kemitraan dalam mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi berkualitas berbasis potensi unggulan daerah	- Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B - Pemenuhan SPM bidang Pendidikan - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik - Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan prioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK)
T.3.2	Peningkatan perlindungan,	S.3.2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem	- Melestarikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan	- Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan		pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata			melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	
				- Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila bagi peserta didik		- Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pancasila dalam pembelajaran di sekolah - Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan	
				- Mendorong integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama		- Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah	
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)							
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi							
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal							
T.4.1	Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif	S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun		Mengoptimalkan model Graduasi melalui pola kemitraan dalam rangka peningkatan pendapatan perempuan dan laki- laki, yang merata dengan mempertimbangkan investasi sektor produktif, optimalisasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pemerataan akses infrastruktur, layanan pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial		Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritasasi masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki. - Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat. - Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik, - Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan				- Pemenuhan SPM Urusan Sosial.
		S.4.1.2	Terbangunnya ekosistem yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi ekonomi lokal desa	Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui pengembangan produk dan layanan UMKM yang didukung oleh pola kemitraan strategis	- Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM - Fasilitasi akses permodalan, pembiayaan dan literasi keuangan - Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan - Pengembangan kawasan pedesaan agrowisata - Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta
		S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	Mendorong transformasi koperasi melalui penguatan kelembagaan, adopsi teknologi digital, serta pengembangan kemitraan usaha yang inklusif terutama untuk sektor-sektor produktif	- Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau. - Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi. - Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi. - Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
T.4.2	Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing	S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh Perempuan, kaum milenial, dan kelompok rentan dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan partisipatif, melalui penguatan SDM, Kemitraan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dengan pelibatan aktif perempuan, kaum milenial, PKRT, kelompok disabilitas, lansia perempuan dan laki-laki dan kelompok masyarakat rentan lainnya.	- Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan - Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiayaan bagi perempuan dan milenial - Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		S.4.2.2	Meningkatnya peran strategis pemuda dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga Provinsi NTT di tingkat Nasional	Meningkatkan pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan fasilitas dan pembinaan olahraga dalam rangka mendukung PON Nusra XXII tahun 2028	- Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya - Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah - Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk mendukung PON Nusra XXII - Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional
MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)					
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman					
T.5.1	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	S.5.1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, dan penguatan kapasitas petani untuk mendukung swasembada pangan termasuk produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol) termasuk yang berada di daerah afirmasi.	- Meningkatkan pemanfaatan lahan - Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis - Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung - Penguatan kapasitas SDM - Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan - Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang antara lain melalui pengembangan Kawasan Strategi Produksi Pangan (KSPP).

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					- Pengembangan komoditas berbasis praktik pertanian baik. - Penguatan rantai nilai dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan.
		5.1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan melalui hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol)	- Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir - Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah
T.5.2	Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja baru dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha	S.5.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat	Meningkatkan akses ketenagakerjaan yang sinergi dengan kebutuhan pasar dan penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan pemerataan bagi perempuan dan laki-laki serta kelompok disabilitas	- Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja - Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman - Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja.

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		S.5.2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pendampingan terpadu dan kemudahan akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi	- Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan - Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif - Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal					
T.5.3	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas sebagai penggerak ekonomi lokal NTT dan menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia	S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	Pengembangan pariwisata di destinasi prioritas Provinsi yang berkualitas dan berkelanjutan	- Peningkatan aksesibilitas pariwisata - Pengembangan atraksi - Pengembangan keterampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata - Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata
					- Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata (IKM, KOPERASI, UMKM dan BUMDES)
					- Kolaborasi dalam rangka mendukung Tour de EnTeTe
		S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal	- Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif - Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat					
T.5.4	Terwujudnya Perlindungan bagi seluruh Tenaga Kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan	S.5.4.1	Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.	Perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan stake holders	- Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek
					- Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						- Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP - Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta - Menyiapkan skema pembiayaan inovatif.
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia						
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin						
T.5.5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	S.5.5.1	Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani	- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat
				- Terhadap Laporan Keuangan : Setiap Laporan Keuangan SKPD maupun Pemprov harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat	
				- Terhadap SPI (Sistem Pengendalian Intern) : Administrasi SPM/SPP harus sesuai SOP yang terdokumentasi dan terukur serta ketepatan waktu.	- Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik	
				- Terhadap Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan : Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan.	- Evaluasi produk-produk regulasi daerah	- Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber
						- Peningkatan Profesionalisme ASN melalui pola karier dan merit sistem - Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mampu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada; - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

TUJUAN (T)		SASARAN (S)			STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						-	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual.
						-	Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas
		S.5.5.2	Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	-	Mendorong kolaborasi terkait peningkatan kontribusi PAD dan aset terhadap pendapatan daerah Meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan kinerja ASN yang handal	-	Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya
				-		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu	
				-		Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	
				-		Mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas	
				-		-	Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja
		S.5.5.3	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor	-	Meningkatkan kolaborasi penegakan hukum, edukasi dan pencegahan konflik untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman. KtP/A dan migrasi aman	-	Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
				-	Penguatan kolaborasi dalam peningkatan perluasan akses bagi perempuan, disabilitas, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya.	-	Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas
				-	Mendorong kolaborasi peningkatan perluasan akses dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan PMI yang berkasus	-	Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB
				-			
				-	Meningkatkan kolaborasi untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman serta pencegahan konflik SARA	-	Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasi migrasi aman serta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

3.2.2 PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN

1) Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

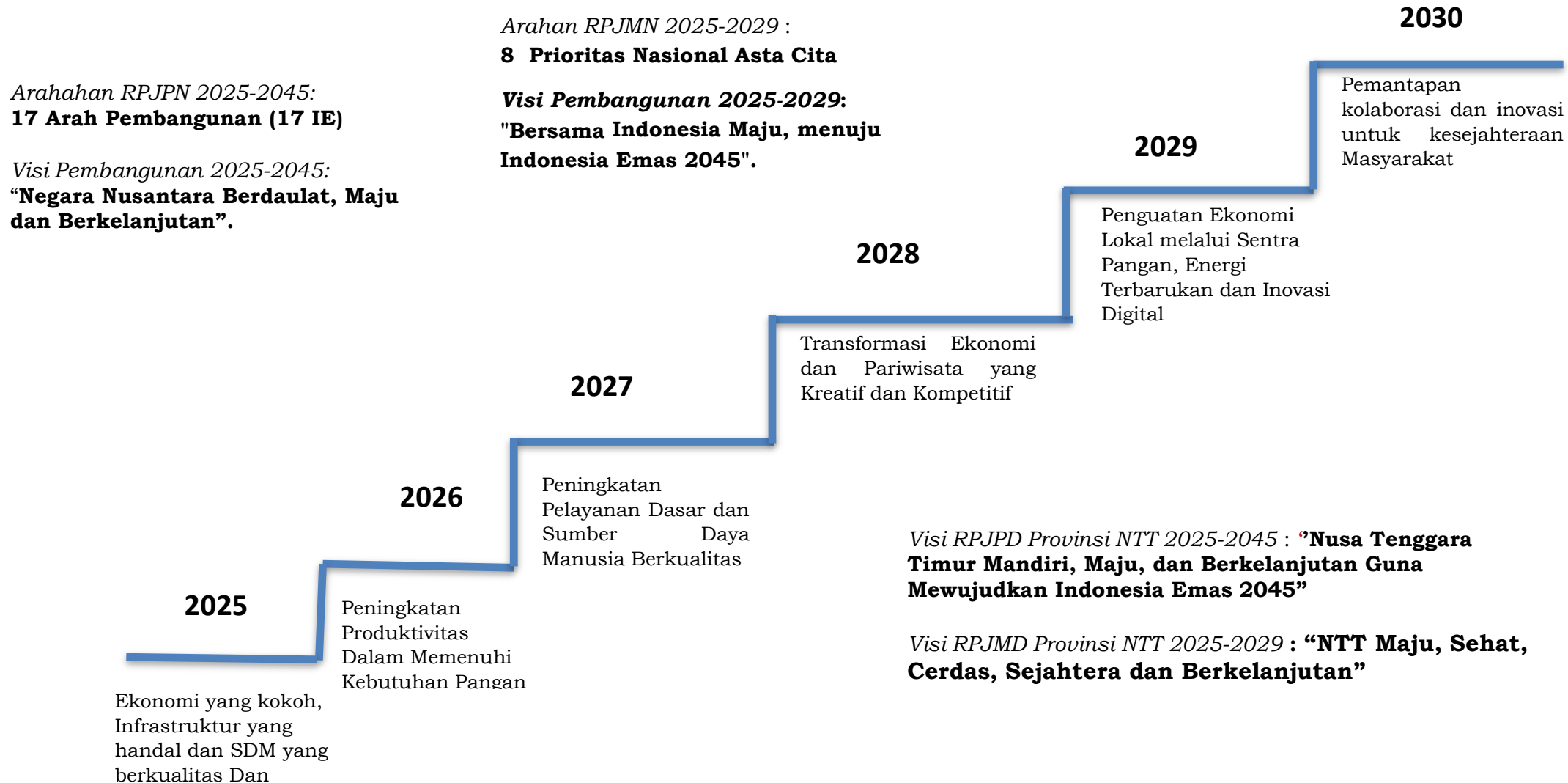
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Pembangunan Provinsi NTT menjadi 5 (lima) tahapan yaitu:

- a. Tahap I Tahun 2026 dengan Prioritas: Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
- b. Tahap II Tahun 2027 dengan Prioritas: Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas;
- c. Tahap III Tahun 2028 dengan Prioritas: Transformasi Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dan Kompetitif;
- d. Tahap IV Tahun 2029 dengan Prioritas: Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sentra Pangan, Energi Terbarukan dan Inovasi Digital; dan
- e. Tahap V Tahun 2030 dengan Prioritas: Pemantapan kolaborasi dan inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat.

Pada setiap tahapan akan diarahkan untuk melaksanakan Tema-tema Pembangunan yang di pilih berdasarkan Arah Tema Pembangunan Nasional pada saat itu, sedangkan Arah Kebijakan per misi, pilar dan cita akan menyesuaikan. Dengan demikian, arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.7 berikut.

Gambar 3.1
Arah Pembangunan Nasional dan Prioritas Tahunan Pembangunan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2025 – 2029



Tabel 3.7 Penahapan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
TAHAPAN PEMBANGUNAN				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tema Umum: MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR YANG SEJAHTERA DAN TANGGUH MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING, SDM UNGGUL, TRANSFORMASI DIGITAL YANG MERATA SERTA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, INOVATIF DAN BERMARTABAT MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN				
Prioritas: Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Prioritas: Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Prioritas: Transformasi Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dan Kompetitif	Prioritas: Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sentra Pangan, Energi Terbarukan dan Inovasi Digital	Prioritas: Pemantapan kolaborasi dan inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat
ARAH KEBIJAKAN				
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 Kolaborasi				
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera				Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar
- Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. - Upaya pengalihan status ruas jalan Provinsi pada kawasan perbatasan negara yang masih merupakan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Nasional. - Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) - Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi. - Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih. - Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. - Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga.				- Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. - Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan Provinsi. - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. - Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air. - Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air. - Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik. - Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN. - Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. - Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas. - Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi. - Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu <i>Timor Biomass Island, Flores Gheothermal Island, Sumba Iconic Island</i>, serta potensi gelombang laut, arus laut, temperatur laut dan hidrogen hijau. - Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. - Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi. - Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah. - Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang. - Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. - Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman. - Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah. - Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu. - Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh). - Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, sistem insentif dan menjaga kestabilan sosial/politik untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan. - Mitigasi Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem yang terancam punah. - Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi. - Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan. - Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi. - Meningkatkan kemitraan dalam penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau. - Meningkatkan literasi digital dan adopsi teknologi untuk pengembangan Koperasi. - Mengoptimalkan platform dan aplikasi digital untuk pengembangan Koperasi.
--	---

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi. - Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM dalam pembangunan yang berketahanan iklim dan resilien terhadap bencana. - Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. (iv) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana - Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Perluasan tutupan lahan kritis secara bertahap - Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi - Optimalisasi inventarisasi dan implementasi aksi mitigasi per sektor yang menyumbang penurunan Emisi GRK - Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim. - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif. - Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. - Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis - Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu - Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok - Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK	- Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih. - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: - Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata. - Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT. - Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan Smart Village dan Smart City melalui: (i) Penetapan Pilot Project Desa Digital (ii) Pengembangan Big Data dan Artificial Intelligence untuk Kebijakan Publik
--	--

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7 Kolaborasi	
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	
- Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan <i>one health</i>, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik. - Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. - Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi). - Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan. - Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix. - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan. - Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra. - Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas. - Upaya pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT. - Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN. - Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil).	
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7 Kolaborasi	
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan	
- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif (PAUD HI); (ii) Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; dan	

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- (iv) Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat Drop Out (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan.
- Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus.
 - Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus.
 - Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan.
 - Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan.
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran.
 - Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI (penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif).
 - Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B.
 - Pemenuhan SPM bidang Pendidikan.
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik.
 - Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan prioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK).
 - Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
 - Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial.
 - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam pembelajaran di sekolah.
 - Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan.
 - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan.
 - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.
 - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah.

MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)

Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 Kolaborasi

Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal

- Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritas masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat.
- Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik.
- Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar.
- Pemenuhan SPM Urusan Sosial.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
- Fasilitasi akses permodalan, pembiayaan dan literasi keuangan.
- Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan.
- Pengembangan kawasan pedesaan agrowisata.
- Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta.
- Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau.
- Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi.
- Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi.
- Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi.
- Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
- Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan.
- Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiayaan bagi perempuan dan milenial.
- Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi.
- Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya.
- Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah.
- Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk mendukung PON Nusra XXII.
- Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional.

MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)

Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7 Kolaborasi

Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
- Meningkatkan pemanfaatan lahan - Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis	- Peningkatan aksesibilitas pariwisata	- Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Peningkatan transparansi dan

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung - Penguatan kapasitas SDM - Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan - Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang. - Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir - Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja - Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman - Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi	- Pengembangan atraksi - Pengembangan keterampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata - Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata - Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata (IKM, Koperasi, UMKM dan BUMDES) - Kolaborasi dalam rangka mendukung Tour de EnTeTe - Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif - Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan	(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP - Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta - Menyiapkan skema pembiayaan inovatif	- akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat - Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik - Evaluasi produk-produk regulasi daerah - Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber - Peningkatan Profesionalisme ASN melalui pola karier dan merit sistem - Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mampu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada; - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual. - Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas. - Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya - Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
kependudukan berupa NIK dan KTP. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja. - Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan - Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif - Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital.	promosi produk ekonomi kreatif		- Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi - mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas - Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja - Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya - Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas - Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB - Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasi migrasi aman serta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anan (KtP/A) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

3.2.3 Arah Pembangunan

1) Arah Pembangunan per Wilayah Pulau

Pembangunan kewilayahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi kesenjangan, baik secara ekonomi maupun sosial. Wilayah kabupaten/kota di NTT terbagi menjadi empat kelompok jika diklasifikasikan berdasarkan Tipologi Klasen. Di Tahun 2022 wilayah NTT yang termasuk dalam kelompok daerah maju adalah Kota Kupang, Rote Ndao, Belu, Ende, dan Ngada. Wilayah yang masuk dalam daerah maju tertekan adalah Kabupaten Kupang dan Sumba Timur. Selanjutnya, wilayah yang masuk dalam kelompok daerah berkembang adalah Kabupaten Sikka, Nagekeo, Sumba Barat, TTS, Malaka, Manggarai Timur, SBD, dan Manggarai Barat. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok Daerah Relatif Tertinggal adalah Kabupaten Flores Timur, Manggarai, Sumba Tengah, Lembata, TTU, Alor, dan Sabu Raijua.

Kemampuan pembangunan masing-masing wilayah sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang berbeda-beda, yang dalam pengelolaannya dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah dan berimbas pada kesenjangan pendapatan antar wilayah. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya.

a. Pulau Sumba

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau terbesar di Provinsi NTT dengan luas wilayah mencapai 11.005 Km² atau 22.96% dari total wilayah provinsi. Dengan luas wilayah tersebut, pulau ini dihuni oleh 775.050 penduduk atau sebesar 15.2% dari total jumlah penduduk di Provinsi NTT. Pulau ini terbagi menjadi 4 wilayah administrasi yang terdiri atas Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur dengan karakteristik dan potensi wilayahnya masing-masing. Meskipun demikian, Kinerja pembangunan daerah di Pulau Sumba masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi NTT.

Pulau Sumba memiliki keberagaman potensi baik daya tarik pariwisata, sumber daya alam, maupun energi baru terbarukan. Hal tersebut menjadi modal dasar yang apabila dikelola dan direncanakan dengan baik serta terarah maka akan berperan penting dalam menunjang pencapaian tujuan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Selain potensi tersebut, Pulau Sumba memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pulau Sumba memiliki potensi EBT yang besar terutama potensi tenaga surya tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Provinsi NTT yang memiliki rasio elektrifikasi yang rendah yaitu 85,84%. Sumba sebagai pulau yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian dan pariwisata yang tinggi, belum dapat memanfaatkan potensi ini secara maksimal karena mengalami kendala pada akses listrik, dan masih terdapat desa yang belum memiliki akses jaringan ke PLN. Oleh karena itu, akselerasi pengembangan EBT di Pulau Sumba diarahkan sebagai penopang energi untuk wilayah NTT dan sekitarnya.

b. Pulau Flores dan Lembata

Pembangunan pariwisata di Pulau Flores dan Lembata tidak terlepas dari dua destinasi unggulan yang ada di dalamnya, yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dan Kelimutu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain kedua potensi unggulan tersebut, terdapat potensi pariwisata beragam dan unik yang tersebar di setiap kabupaten di Flores dan sekitarnya. Terletak di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang yang luas dan ekosistem laut yang sehat, ketersediaan sumber makanan yang cukup bagi ikan-ikan di perairan Flores dan sekitarnya serta upaya konservasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, aktivitas wisata seperti *diving* dan *snorkeling* sangat potensial untuk dikembangkan seperti di wilayah perairan Labuan Bajo, Riung, Lembata dan Alor.

Aktivitas trekking, *bird watching* dan kegiatan petualangan lain yang menonjolkan keindahan alam Flores dan sekitarnya juga dapat dikembangkan. Potensi wisata budaya berupa Atraksi budaya seperti Caci, tinju adat Etu, prosesi Semana Santa di Larantuka hingga perburuan ikan paus di Lamalera sangat potensial untuk dikembangkan.

Potensi pariwisata yang terdapat di Pulau Flores dan Lembata, maka arah pembangunan kewilayahan Pulau Flores dan Lembata diarahkan pada kawasan pariwisata berbasis ekowisata yang premium. Pengembangan ekowisata di Pulau Flores juga diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang baik antar destinasi, sehingga wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai tempat menarik di Flores. Hal ini menjadi alternatif kunjungan wisatawan ke Pulau Flores selain ke Manggarai Barat dan Ende sehingga diharapkan dapat meningkatkan lama kunjung wisatawan.

Selain potensi pariwisata, Pulau Flores juga terkenal sebagai penghasil tanaman pertanian seperti padi, tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan jambu mete dan perikanan budidaya khususnya rumput laut. Kabupaten Flores Timur diproyeksikan untuk menjadi pusat produksi, industri dan ekosistem riset dan inovasi dengan dukungan kontribusi dari kabupaten sekitarnya seperti Lembata dan Alor.

c. Pulau Timor

Kondisi geografis dan hidrologi Pulau Timor mendukung pengembangan potensi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, potensi-potensi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri sangat penting untuk mewujudkan pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif di Pulau Timor.

Usaha-usaha pertanian dan peternakan dipercaya akan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, daerah ini diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Dengan Food Estate yang berlokasi di Belu, ke depan Belu diarahkan menjadi penopang pangan di Pulau Timor. Proyeksi ke depan, Greater Kupang (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) diarahkan untuk menjadi Pusat Produksi, Industri dan ekosistem riset-inovasi Rumput Laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Rote Ndao.

d. Pulau-pulau: Alor, Rote, Sabu

Pulau Alor

Pulau Alor terletak di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, sehingga sektor perikanan sangat potensial untuk dikembangkan. Pada Tahun 2021, produksi ikan tongkol Alor menjadi yang terbesar di NTT yaitu mencapai 4.284 ton sedangkan di tahun yang sama produksi ikan tuna menjadi yang terbesar ke empat di NTT dengan 562 ton. Adapun produksi rumput laut pada Tahun 2022 sebesar 2015 ton (terbesar ke enam di NTT). Namun pemanfaatan potensi yang ada ini perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Di sektor pertanian, khususnya tanaman Perkebunan dan pertanian, potensi yang cukup menonjol dari Kabupaten Alor disumbang dari komoditas jambu mete, vanili, kemiri, kenari, jagung dan ubi kayu. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 luas areal tanam jambu mete 12.636 ha dengan produksi 3.507 ton (terbesar ke enam di NTT). Produksi jagung pada Tahun 2022 sebesar 26.916 (terbesar ke tujuh di NTT), sedangkan produksi ubi kayu 35.751 ton (terbesar ke sembilan di NTT).

Potensi pariwisata di Kabupaten Alor terletak pada budaya dan tradisi unik masyarakat lokal seperti Kampung Adat Takpala yang masih memegang teguh warisan budaya leluhur. Selain itu, Alor terkenal dengan keindahan pantai pasir putih dan pulau-pulau kecilnya. Terdapat banyak spot untuk menikmati keindahan bawah laut di Alor baik untuk *snorkeling* maupun *diving*. Atraksi pengamatan dugong juga cukup terkenal di Alor. Spesies yang mulai langka ini biasanya hidup pada habitat dengan kualitas yang baik. Ini juga erat kaitannya konservasi yang terus dilakukan dan berkembang baik di perairan Alor.

Selain itu, di wilayah laut Pulau Alor juga terdapat potensi energi baru terbarukan (EBT) yakni arus laut yang dapat dikembangkan untuk penyediaan energi listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Memperhatikan potensi yang ada, Kabupaten Alor diproyeksikan dapat memberikan dukungan kontribusi bagi Kabupaten Flores Timur sebagai pusat produksi, industri serta ekosistem riset dan inovasi.

Pulau Rote

Rote Ndao memiliki potensi perikanan yang sangat besar karena didukung oleh kondisi geografis dan ekosistem laut yang kaya. Perairan di sekitar Rote Ndao merupakan habitat yang baik untuk ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain itu, jenis ikan karang seperti kerapu, kakap, dan baronang banyak ditemukan di perairan dangkal di sekitar Rote Ndao. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut sangat menjanjikan. Tahun 2022 produksi rumput laut tercatat sebanyak 88.028 ton yang menjadikan Rote Ndao sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke dua di NTT.

Di sektor peternakan, Pulau Rote memiliki potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Rote Ndao pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 30.283 ekor (terbanyak ke dua di NTT). Selain itu, Pulau Rote termasuk dalam pulau-pulau terluar dengan kekayaan destinasi wisata dan keindahan alam yang sangat memukau. Beberapa destinasi wisata yang sangat terkenal di Rote Ndao misalnya Pantai Nembrala yang terkenal untuk *surfing* dan Mulut Seribu.

Pulau Sabu

Sabu Raijua juga memiliki kondisi geografis dan ekosistem laut yang mendukung perkembangan sektor perikanan. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut Sabu Raijua pada Tahun 2022 sebanyak 53.921 ton menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke tiga di NTT. Selain rumput laut, Pulau Sabu juga memiliki potensi pengembangan garam dengan dukungan garis pantai kondisi panas yang sangat mendukung kualitas garam yang baik. Terdapat pula potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Sabu Raijua pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 35.633 ekor yang menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah dengan populasi domba terbanyak di NTT.

Di sektor pariwisata, Pulau Sabu juga termasuk dalam kategori pulau terluar yang memiliki objek wisata baik alam, wisata laut maupun budaya misalnya Kelaba Maja dan ritus-ritus budaya yang dikembangkan di masyarakat. Dengan potensi yang ada, Sabu Raijua diharapkan dapat memberikan kontribusi/penyuplai dukungan kontribusi bagi Greater Kupang sebagai pusat produksi, industri serta ekosistem riset dan inovasi.

2) Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT

Lokus pembangunan per Pulau secara umum disandingkan dengan arah pembangunan Wilayah Bali-Nusra yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut pada Tabel 3.9 di bawah ini antara lain meliputi:

1. Kawasan Strategis: Penguatan Kawasan Pariwisata Prioritas Eksiting
2. Kawasan Sentra Produksi Pangan
3. Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan:
 - a. Kawasan Pariwisata Rintisan
 - b. Kawasan terintegrasi berbasis Perikanan
 - c. Kawasan Perkotaan

Tabel 3.8 Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2025-2029

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	
A	➤ Kawasan Pertumbuhan Kawasan Pawisata 1. Destinasi Parawisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo – Kab. Manggarai Barat, dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo – Flores : • Kab. Manggarai • Kab. Ngada, dan • Kab. Ende Kawasan Perkotaan 2. Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Parawisata Labuan Bajo - Kab. Manggarai Barat	• Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui peningkatan aksesibilitas (jalan strategis dan pelabuhan kapal pesiar), pembangunan prasarana dan amenitas pariwisata (SPAL, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan dan revitalisasi pasar rakyat), atraksi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan keterampilan SDM (pembinaan, pelatihan, pembekalan kerja) • Pengembangan Kawasan perkotaan pariwisata Labuan Bajo melalui penataan dan peningkatan citra kota (penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kawasan), peningkatan prasarana pelayanan dasar perkotaan, serta peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.	A	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (<i>hexa helix</i>) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
B	➤ Kawasan Komoditas Unggulan Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut 1. Kab. Kupang dan Kota Kupang 2. Kab. Sumba Timur	• Penyiapan pengembangan sentra industri komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui penguatan produksi rumput laut, industri, ekspor, aksesibilitas dan konektivitas, peningkatan kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkatan sarana prasana pendukung (termasuk pembangunan jalan akses Pelabuhan maritain), pendampingan UMKM/IKM, koperasi, dan BUMDes, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.	B	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (<i>hexa helix</i>) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi,

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH			
No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut - Kab. Kupang - Kab. Sumba Timur - Kab. Rote Ndao - Kab. Sabu Raijua - Kab. Alor - Kab. Flores Timur Sentra Industri Berbasis Garam - Kab. Sabu Raijua - Kab. Kupang - Kab. Nagekeo Sentra Produksi Berbasis Garam - Kab. Sabu Raijua - Kab. Kupang - Kab. Nagekeo - Kab. Sumba Timur - Kab. Ende	Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi melalui peningkatan produksi, industri, aksesibilitas dan konektivitas, sertifikasi mutu produk, perluasan ekspor, promosi produk garam industri, pengembangan BUMDes, serta kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkatan sarana prasarana (pelabuhan, jalan strategis, inovasi teknologi).	Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
C	➤ Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Sumba Tengah: KSPP Kab. Belu: KSPP, potensial air Kab. Manggarai Barat: potensial pangan. Kab. Manggarai: potensial pangan, potensial energi.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah melalui pengembangan kawasan (termasuk optimasi lahan, pembangunan embung, jaringan drainase dan irigasi), peningkatan produksi termasuk penyediaan benih dan pengendalian hama, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana produksi; penguatan pasca panen dan tata kelola, serta pengembangan riset dan inovasi teknologi.	C Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH			
No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
	5. Kab. Manggarai Timur: potensial pangan. 6. Kab. Sikka: potensial pangan 7. Kab. Lembata: potensial pangan. 8. Kab. Kupang: potensial air, potensial energi. 9. Kab. Nagekeo: potensial air 10. Kab. Timor Tengah Selatan: potensial pangan	- Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan pangan (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (sapi dan babi) melalui penguatan produksi, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, penguatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, serta diversifikasi pangan pada kawasan rentan - Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas tampungan/SDA termasuk bendungan, serta penyediaan sumber air baku alternatif di kawasan rawan air dengan embung dan/atau pengeboran sumber air - Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan melalui percepatan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur pembangkit listrik berbasis EBT terutama energi surya, perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan di kawasan rentan energi, penyediaan sarana prasarana pendukung, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan pada Kawasan rendah elektrifikasi	kepentingan (<i>hexa helix</i>) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
D	➤ Kawasan Afirmasi Daerah tertinggal - Kab. Sumba Tengah - Kab. Sumba Barat Daya - Kab. Sabu Raijua	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal, inovasi berbasis	D Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH			
No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
	*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Kawasan Perbatasan - PKSN dan Wilayah Pendukung - Kecamatan PKSN Kefamenanu, Kec. Biboki Moenleu, Naibenu, Mutis, Musi - Kab. Timor Tengah Utara - PKSN Atambua, Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi - Kab. Belu - PKSN Kalabahi, Kec. Pantar Timur - Kab. Alor - Perbatasan Prioritas - Kec. Lamboya, Lamboya Barat - Kab. Sumba Barat	pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dan pariwisata; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar (penyediaan rumah layak, sarana prasarana, peningkatan SPAM, SPAL), pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.	dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (<i>hexa helix</i>) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH			
No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
	2. Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu – Kab. Sumba Timur 3. Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur – Kab. Kupang 4. Kec. Nunloko, Kot Olin, Kualin – Kab. Timor Tengah Selatan 5. Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Ndao Nuse – Kab. Rote Ndao 6. Kec. Kodi Balaghar – Kab. Sumba Barat Daya 7. Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua – Kab. Sabu Raijua 8. Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka Kawasan Transmigrasi 1. KT Ponu – Kab. Timor Tengah Utara	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu, Tasifeto – Mandeu, dan Kobalima Timur, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan	

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH			
No	RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029
	2. KT Tasifeto Mandeu – Kab. Belu 3. KT Kobalima Timur – Kab. Malaka Kawasan Perdesaan Prioritas 1. Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa – Kab. Ngada	aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, penataan persebaran penduduk, serta penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil. • Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berbasis komoditas Kopi Flores Bajawa, melalui penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas desa, peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, peningkatan kapasitas tata kelola desa.	
E	➤ Kawasan Konservasi 1. Taman Nasional Komodo – Kab. Manggarai Barat 2. Cagar Alam Wae Wuul – Kab. Manggarai Barat 3. Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya – Kab. Alor 4. Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau – Kab. Ngada 5. Cagar Alam Riung – Kab. Ngada 6. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. Di Prov. NTT)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta peningkatan sarana prasarana pendukung.	E • Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semangat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (<i>hexa helix</i>) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Hasil olahan Tim Penyusun

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh outcome, indikator yang bermuara pada pemilihan program- program prioritas daerah yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Secara umum, kerangka perumusan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di lihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Menunjuk amanat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dengan demikian, pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur, yang menjabarkan makna Dasa Cita Ayo Bangun NTT dengan 5 Misi, 7 Pilar/Prioritas Pembangunan dan 10 Dasa Cita yang kemudian mengerucut pada pemilihan program – program prioritas pembangunan daerah. Pemetaan Misi, Prioritas Daerah/Pilar dan Dasa Cita Ayo Bangun NTT pada Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

MISI	1	2	3	4	5
PILAR PEMBANGUNAN	3,7	4,7	5,7	2,7	1,6,7
DASA CITA	7, 9,10	4,5,10	6,10	2,10	1,3,4,8,10
MISI	PILAR PEMBANGUNAN		DASA CITA		
Misi I Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	Pilar 3: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Pilar 7: KOLABORASI		Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama		

MISI	PILAR PEMBANGUNAN	DASA CITA
Misi II Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	Pilar 4: KESEHATAN Pilar 7: KOLABORASI	Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat. Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi III Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	Pilar 5: PENDIDIKAN Pilar 7: KOLABORASI	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi IV Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	Pilar 2: PEMBERDAYAAN KOMUNITAS Pilar 7: KOLABORASI	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi V Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	Pilar 1: EKONOMI BERKELANJUTAN Pilar 6: REFORMASI BIROKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA Pilar 7: KOLABORASI	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama

Adapun Pilar Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan

- a. Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
- b. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
- c. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
- d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas

- a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;

- b. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
- c. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
- d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan

- a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
- b. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi;
- c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. Pilar 4: Kesehatan

- a. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan hexahelix;
- b. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
- c. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
- d. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
- e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.

5. Pilar 5: Pendidikan

- a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
- b. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
- c. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
- d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
- e. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.

6. Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia

- a. Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani;
- b. Memperkuat sumber pendapat daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
- d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7. Pilar 7: Kolaborasi

- a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah
- b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT
- c. Mengoptimalkan penggunaan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan di Provinsi NTT.

Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan 3.3 di bawah ini. Dengan demikian terdapat 156 program prioritas pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Kemudian, sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan turunannya, maka pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan acuan ketentuan yang berlaku yang tertuang di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) seperti pada Tabel 3.10.



Gambar 3.2 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

TRANSFORMASI NTT: AYO BANGUN NTT

VISI

NTT Maju, Sehat, Cerdas,
Sejahtera, dan Berkelanjutan



Gambar 3.3 Visi, Misi dan Pilar Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Tabel 3.10 Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2029

VISI: NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 : Kolaborasi				
Tujuan 1.1 : Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan				
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (<i>green and blue infrastructure</i>), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim				
a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
b. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PUPR
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI		DLHK
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/ Kota	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		DINAS ESDM

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
c. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah				
Meningkatnya cakupan Pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	ESDM
Meningkatnya tata kelola baru terbarukan	Porsi EBT dalam bauran energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
d. Tersedianya Rumah Layak Huni				
Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		PUPR
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		PUPR
Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		PUPR
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		PUPR
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		PUPR

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		PUPR
Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	1.03.07 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PUPR
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya kualitas pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transrnigrasi yang Berkembang	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
e. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy)				
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DLHK
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan Izin lingkungan	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DLHK
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		DLHK
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM
f. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim				
1. Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	BPBD
2. Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			BPBD
3. Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	3. Persentase Penanganan Pasca Bencana			BPBD
1. Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN,		SATPOL PP

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam bauran energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing antar wilayah				
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi darat	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi 2. Konektivitas Laut	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKT DESA
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1.2 : Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital				
Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi				
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		DINAS KOMINFO
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DPMPTSP
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)				
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 2.1 : Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		DP3AP2KB

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3AP2KB
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		DP3AP2KB
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	
Sasaran 2.1.2 : Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		BAPPERIDA
Sasaran 2.1.3 : Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan				
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT				
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
Sasaran 2.1.5 : Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM				
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)				
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 3.1 : Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran				
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif				
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Presentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Presentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	2.24.05 PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	3. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3AP2KB
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DP3AP2KB
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		DP3AP2KB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DP3AP2KB

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 3.2 : Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan				
Sasaran 3.2.1 : Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		BADAN KESBANGPOL

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		BADAN KESBANGPOL
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)				
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 : Kolaborasi				
Tujuan 4.1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan				
Sasaran 4.1.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun				
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan 3. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS 4. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS SOSIAL

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS SOSIAL
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DP3AP2KB
Sasaran 4.1.2. Meningkatkan ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa				
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase promosi penanaman modal	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sasaran 4.1.3 Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha				
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		DINAS KOPERASI DAN UMKM

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Tujuan 4.2. Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing				
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DP3AP2KB
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		DP3AP2KB
Sasaran 4.2.2.Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional				
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda yang di Bina	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang di bina	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)				
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 5.1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah				
Sasaran 5.1.1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian				
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, M odern dan Aman	DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2. Peningkatan Produksi Hortikultura			
	3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan			
Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Meningkatnya Produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasaran 5.1.2. Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah				
Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	1. Kawasan Konservasi Daerah yang Operasional	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2. Jumlah Produksi Garam Rakyat			
Meningkatnya Produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DLHK
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentasi sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		DLHK
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		BAPPERIDA
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Jumlah Kabupaten yang menetapkan LP2B.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2. Persentase Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Hasil (UPH)			
Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian			

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.2. Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha				
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat				
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Sasaran 5.2.2. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif				
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DPMTSP
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.3. Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT				
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (detinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal				
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Sasaran 5.3.2. Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif				
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Terkendalinya Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL		DPMPTSP

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.4. Terwujudnya Perlindungan Bagi Seluruh Tenaga Kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan				
Sasaran 5.4.1. Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.				
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		DINAS SOSIAL
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
Tujuan 5.5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia				
Sasaran 5.5.1. Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani				
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DINAS KOMINFO
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		DINAS KOMINFO
Sasaran 5.5.2. Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah				
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DPMPSTP
Sasaran 5.5.3. Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi				
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan	BADAN KEPEGAWAIAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DAERAH
3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya			
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik			
Sasaran 5.5.4. Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor				
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	BIRO KESRA
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOL PP
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya			
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Pant	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		DINAS SOSIAL
	3. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Pant			
	4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Pant			
	5. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Pant			
	6. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Pant			

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan daerah disusun guna menggambarkan keterkaitan antar program perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup;
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi; dan
6. Upaya untuk mendukung kegiatan prioritas utama yang menjadi prioritas nasional seperti tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana program perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode Tahun 2025 sampai dengan 2029 berjumlah 156 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Sumber pendanaan program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar daerah.

Dalam upaya mencapai pembangunan yang **holistik dan berkelanjutan**, setiap program perangkat daerah tidak dapat berdiri sendiri. Berbagai isu pembangunan bersifat **cross-cutting**, artinya melintasi batas-batas sektor dan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi serta terintegrasi antarperangkat daerah. Memahami dan mengimplementasikan narasi tematik cross-cutting isu menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, serta menghindari duplikasi dan fragmentasi kebijakan.

Pendekatan tematik ini mendorong perangkat daerah untuk **berpikir di luar kotak sektoral**. Ini berarti mengidentifikasi program dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih luas, dan dapat berkolaborasi dengan perangkat daerah lain untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Tanpa narasi tematik *cross-cutting*, perencanaan berisiko menciptakan program-program yang berjalan sendiri, dengan potensi konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan dampak yang tidak optimal.

Berikut adalah beberapa isu *cross-cutting* dan keterkaitannya antarprogram perangkat daerah:

A. Isu GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

- 1) **Pendidikan:** Perangkat daerah pendidikan bertanggung jawab atas kurikulum, fasilitas, dan kualitas pengajaran.
- 2) **Kesehatan:** Perangkat daerah kesehatan memastikan gizi yang baik, imunisasi, dan akses layanan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
- 3) **Tenaga Kerja:** Perangkat daerah tenaga kerja menghubungkan lulusan dengan pasar kerja dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan.
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat:** Perangkat daerah terkait pemberdayaan dapat memfasilitasi program-program peningkatan kapasitas bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan.

B. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

- 1) **Sosial:** Perangkat daerah sosial memberikan bantuan sosial, data kemiskinan, dan program jaring pengaman sosial.
- 2) **Koperasi dan UMKM:** Perangkat daerah terkait UMKM dan koperasi mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
- 3) **Pertanian dan Ketahanan Pangan:** Perangkat daerah pertanian dan Ketahanan Pangan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.
- 4) **Kelautan dan Perikanan:** Perangkat daerah Kelautan dan perikanan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan
- 5) **Infrastruktur:** Perangkat daerah pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyediakan akses dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesehatan.

C. Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim:

- 1) **Lingkungan Hidup:** Perangkat daerah lingkungan hidup merumuskan kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam.
- 2) **Pertanian/Kehutanan:** Perangkat daerah terkait pertanian/kehutanan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari.
- 3) **Pekerjaan Umum:** Perangkat daerah pekerjaan umum membangun infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti sistem drainase yang baik dan mitigasi bencana.
- 4) **Perencanaan Pembangunan:** Perangkat daerah perencanaan pembangunan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah.

**Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi NTT Tahun 2026-2030**

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,709,254		1,709,254		1,709,254		1,709,254		1,709,254	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				669,724		683,119		696,781		710,717		724,931	
Outcome 1.1 : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1.1 Presentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	75.92	76.42		76.92		77.42		77.92		78.42		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2 Presentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	54.35	54.85		55.35		55.85		56.35		56.85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	50	53		60		65		70		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				700		700		700		700		700	
Outcomes: Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.Indeks Pemerataan Guru	NA	0,440		0,500		0,525		0,610		0,700		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik - SMA - SMK	22 21	25 30		30 40		40 50		50 60		60 70		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				450		450		450		450		450	
Outcomes: Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				675.357.7 94.812		742.893. 574.293		817.182.9 31.723		898.901 .224.89 5		988.791.3 47.384	
Outcome 1.1 : Meningkatnya	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				326.053.3 40.726		358.658. 674.799		394.524.5 42.278		433.976 .996.50 6		442.656.5 36.436	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	103.00	99.00		97.00		95.00		93.00		91.00		Dinas Kesehatan
	2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	37,9 (2023 SKI)	31,9		30,7		29,5		28,38		27,1		Dinas Kesehatan
	3. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	35	40		43		45		48		50		Dinas Kesehatan
	4. Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	55	65		70		75		80		90		Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				69.649.27 8.530		76.614.2 06.383		84.275.62 7.021		92.703. 189.723		101.973.5 08.696	
Outcomes: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				80.000.00 0		88.000.0 00		96.800.00 0		106.480 .000		117.128.0 00.000	
Outcomes: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	50	50		50		50		50		50		Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				69.320.00 0		76.252.0 00		83.877.20 00		92.264. 920		101.491.4 12	
Outcomes: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	50	60		65		70		75		80		Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				53,202		53,202		53,202		53,202		53,202	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				15,596		15,596		15,596		15,596		15,596	
Outcome 1.1: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	50	60		65		70		75		80		Dinas PUPR
	2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
	3. Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Dinas PUPR
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan Air baku dan meningkatnya dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan	Persentase Peningkatan pemanfaatan air baku	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				24,748		24,748		24,748		24,748		24,748	
Outcome 2.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	NA	20		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1,416		1,416		1,416		1,416		1,416	
Outcome 3.1: Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,752		1,752		1,752		1,752		1,752	
Outcome 4.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	35	36		38		39		40		42		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1,334		1,334		1,334		1,334		1,334	
Outcome 5.1: Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	NA	45		45		45		45		45		Dinas PUPR
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				5,800		5,800		5,800		5,800		5,800	
Outcome 6.1: Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	NA	85		85		85		85		85		Dinas PUPR
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				552		552		552		552		552	
Outcome 7.1: Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	NA	85		85		85		85		85		Dinas PUPR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				250		250		250		250		250	
Outcome 8.1: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	NA	40		40		40		40		40		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				42,883		43,741		44,616		45,508		46,418	
Outcome 9.1: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan	70	73		78		83		88		93		Dinas PUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1,375		1,375		1,375		1,375		1,375	
Outcome 10.1: Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	NA	35		35		35		35		35		Dinas PUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				800		800		800		800		800	
Outcome 11.1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				10,147		10,147		10,147		10,147		10,147	
Outcome 1.1: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga	1. Persentase Warga Negara Korban	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni												
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumahyang Lavak Huni	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4,306		4,306		4,306		4,306		4,306	
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	NA	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				21,288		21,288		21,288		21,288		21,288	
Outcome 1.1: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi	100	100		100		100		100		100		Dinas PUPR

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)												
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14,349		14,349		14,349		14,349		14,349	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		SatpolPP
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				812		812		812		812		812	
Outcomes: 1.Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100		100		100		100		100		SatpolPP
2.Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100		100		100		100		100		SatpolPP
3.Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	25	30		35		40		45		50		SatpolPP

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7,014		7,014		7,014		7,014		7,014	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		BPBD
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4,324		4,410		4,498		4,588		4,680	BPBD
Outcomes: 1. Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
2. Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
3. Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100		100		100		100		100		BPBD
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
Outcomes: 1. Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100		100		100		100		100		SatpolPP

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100		100		100		100		100		SatpolPP
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26,042		26,042		26,042		26,042		26,042	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Sosial
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,393		1,421		1,450		1,479		1,508	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	2.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	4. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	NA	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				192		196		200		204		208	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan	Persentase Warga Negara Migran Korban	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Tindak Kekerasan yang Tertangani												
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				17,759		18,114		18,476		18,846		19,223	
Outcomes: Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	2.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	3.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				5,174		5,277		5,383		5,491		5,600	
Outcomes: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,302		1,302		1,302		1,302		1,302	
Outcomes: Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				161		165		168		171		175	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19,121		19,121		19,121		19,121		19,121	
Outcome 1.1 : Meningkatnya	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Ketenaga

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													kerjaan dan Transmigrasi
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				750		750		750		750		750	
Outcome 1.1: Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	NA	10		20		30		40		50		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				650		650		650		650		650	
Outcome 1.1: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	NA	50		60		70		80		90		Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				360		360		360		360		360	
Outcome 1.1: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan pencari kerja di pasar kerja	85,97	86		87		88		89		90		Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				11,091		11,313		11,539		11,770		12,005	
Outcome 1.1: Meningkatnya	Persentase perusahaan yang	20,79	21		22		23		24		25		Ketenaga kerjaan dan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pekerja Indonesia yang terlindungi	membentuk sarana hubungan industrial												Transmigrasi
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				150		150		150		150		150	
Outcome 1.1: Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja	50	51		52		53		54		55		Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14,236		14,236		14,236		14,236		14,236	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		DP3AP2KB
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				520		572		630		692		762	
Outcomes: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1.Persentase Perangkat Darah yang melaksanakan strategi PUG	95	100		100		100		100		100		DP3AP2KB
	2.Persentase kelompok perempuan atau lembaga yang	N.A	18		45		68		82		100		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	terfasilitasi pemberdayaan dalam bidang pembangunan yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, IPTEK, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				2.649		2.914		3.205		3.526		3.879	
Outcomes: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100		100		100		100		100		DP3AP2KB
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				700		770		847		932		1.024	
Outcomes: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kolaborasi stakeholder dalam pembentukan dan peningkatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	NA	18		36		54		77		100		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Puspaga) untuk wujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak												
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				253		278		306		336		370	
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	100		100		100		100		100		DP3AP2KB
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.002		1.102		1.213		1.334		1.467	
Outcomes: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	52,03	55		60		65		70		75		DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				2.071		2.278		2.506		2.756		3.032	
Outcomes: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan	100	100		100		100		100		100		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Layanan Komperhensif												
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2,318		2,365		2,412		2,460		2,509	
Outcome 1.1: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	72,38	73,5		74		74,5		75		75,5		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				800		800		800		800		800	
Outcome 1.1: Meningkatnya penanganan kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	16,83	16,5		16		15,5		15		14,5		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				400		400		400		400		400	
Outcome 1.1: Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	42	78		78,5		79		79,5		80		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				185		185		185		185		185	
Outcomes: Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	NA	100		100		100		100		100		Dinas PUPR
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													
Outcomes: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	...	...		...		...		...		...		Outcomes: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				250		250		250		250		250	
Outcomes: Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	35	40		45		50		55		60		Dinas PUPR
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				50		50		50		50		50	
Outcomes: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	10	50		60		70		85		100		Dinas PUPR
2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN													
Outcomes: Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	N.A	...		...		...		...		...		Dinas PUPR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				91,928		91,928		91,928		91,928		91,928	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				250		250		250		250		250	
Outcome 1.1: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1,003		1,003		1,003		1,003		1,003	
Outcome 1.1: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	56,59	71,30		71,50		71,70		71,90		72,10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Indeks kualitas udara	92,3	89,23		89,43		89,63		89,83		90,03		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3. Indeks Kualitas Air Laut	84,08	84,20		84,25		84,30		84,35		84,40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,63	70,82		70,89		70,96		71,03		71,10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				152		152		152		152		152	
Outcome 1.1: Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				500		500		500		500		500	
Outcome 1.1: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan Izin lingkungan	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9,020		9,020		9,020		9,020		9,020	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Dukcapil
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				510		520		531		541		552	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	N.A	25		50		65		85		95		Dinas Dukcapil
	2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	N.A	25		50		65		85		95		Dinas Dukcapil
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL				1,029		1,050		1,071		1,092		1,114	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
	2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN				600		600		600		600		600	
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				500		500		500		500		500	
Outcomes: Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100		100		100		100		100		Dinas Dukcapil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9,487		9,487		9,487		9,487		9,487	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kinerja Perangkat Daerah													dan Desa
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA				1,136		1,136		1,136		1,136		1,136	
Outcomes: Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				500		500		500		500		500	
Outcomes: Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				425		425		425		425		425	
Outcomes: Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	2.Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				32,825		33,482		34,152		34,835		35,531	
Outcomes: Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1.Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	2.Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N.A	35		36		37		39		40		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				212		233		256		282		314	
Outcomes: Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	1.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,71	2.67		2.63		2.60		2.56		2.53		DP3AP2KB
	2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 19)	21,5	21,0		20,8		20,4		20,2		21,5		DP3AP2KB

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				406		447		492		541		595	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Proporsi Kebutuhan BerKB yang terpenuhi	62,6	64,6		65,6		66,6		67,3		68,7		DP3AP2KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				402		442		487		535		589	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	N.A	50		50		50		50		50		DP3AP2KB
	2. Indeks Lansia Berdaya	58,8	59,6		59,9		60,3		60,7		61,0		DP3AP2KB
	3. Indeks Pengasuhan Remaja	80,6	83,6		84,7		85,8		86,9		87,9		DP3AP2KB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				40,535		40,535		40,535		40,535		40,535	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kinerja Perangkat Daerah													
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				9,627		9,627		9,627		9,627		9,627	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	2,457	2,478		2,478		2,500		2,500		2,522		Dinas Perhubungan
	2. Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,132	0,135		0,137		0,140		0,141		0,144		Dinas Perhubungan
	3. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang Terhadap Kondisi Ideal	0,58	0,68		0,78		0,88		0,98		1,08		Dinas Perhubungan
	4. V/C Rasio di Jalan Provinsi	0,406	0,404		0,403		0,402		0,401		0,400		Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				17,021		17,021		17,021		17,021		17,021	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	1. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	3,000	3,074		3,111		3,148		3,185		3,222		Dinas Perhubungan
	2. Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,205	0,208		0,211		0,213		0,216		0,219		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Konektivitas Laut	11,670	12,830		12,830		14,670		14,670		14,670		Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9,745		9,745		9,745		9,745		9,745	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kominfo
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,743		1,778		1,814		1,850		1,887	
Outcomes: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75	80		85		90		95		100		Dinas Kominfo
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				5,888		6,006		6,126		6,248		6,373	
Outcomes: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital	3,87/	3,89/1,7		3,91/1,7		3,95/1,9		4,0/1,9		4,1/2		Dinas Kominfo

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7,814		7,814		7,814		7,814		7,814	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				100		100		100		100		100	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,11	3.56		3.64		3.72		3.80		3.88		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				3,009		3,069		3,131		3,193		3,257	
Outcome 1.1: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50	65		70		75		80		90		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				50		50		50		50		50	
Outcome 1.1: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	77,81	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				400		400		400		400		400	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	77,81	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1,025		1,025		1,025		1,025		1,025	
Outcome 1.1: Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	77,81	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				286		292		298		304		310	
Outcome 1.1: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha Kecil yang Bertransfor masi dari Informal ke Formal	10	15		20		25		30		35		Dinas Koperasi dan UMKM
	2. Pertumbuh an Wira usaha	5,5	6,0		6,5		7,5		8		9		Dinas Koperasi dan UMKM
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1,025		1,025		1,025		1,025		1,025	
Outcome 1.1: Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	N.A	10		15		20		25		30		Dinas Koperasi dan UMKM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI				50		50		50		50		50	
Outcome 1.1: Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	70	75.00		77.00		80.00		81.00		85.00		Dinas Koperasi dan UMKM
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8,410		8,410		8,410		8,410		8,410	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				266		271		277		282		288	
Outcome 1.1: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi mMeningkat	17,27	10		10		10		10		10		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				250		255		260		265		270	
Outcome 1.1: Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase promosi penanaman modal	N.A	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				650		650		650		650		650	
Outcome 1.1: Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase izin dan nonizin yang diterbitkan sesuai ketentuan (SOP)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				316		323		329		336		342	
Outcome 1.1: Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Tingkat kepatuhan pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai Ketentuan	59,86	75,86		83,86		91,86		99,86		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				175		175		175		175		175	
Outcome 1.1: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	93,23	96		97		98		99		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL				50		50		50		50		50	
Outcome 1.1: Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA													
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12,886		12,886		12,886		12,886		12,886	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				15,850		15,850		15,850		15,850		15,850	
Outcomes: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda yang di Bina	17	33		50		67		83		100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAAHRAHAAN				26,461		26,461		41,461		24,061		24,061	
Outcomes: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang di bina	100	100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,148		1,148		1,148		1,148		1,148	
Outcomes: Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				301		301		301		301		301	
Outcomes: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,4		2,8		3,1		3,5		4		Dinas Kominfo
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				311		311		311		311		311	
Outcomes: Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat 1	Tingkat 2		Tingkat 2		Tingkat 3		Tingkat 4		Tingkat 5		Dinas Kominfo

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,010		1,010		1,010		1,010		1,010	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2,701		2,701		2,701		2,701		2,701	
Outcomes: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				5,215		5,319		5,425		5,534		5,644	
Outcomes: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				500		500		500		500		500	
Outcomes: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				646		659		672		686		699	
Outcomes: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				3,440		3,508		3,579		3,650		3,723	
Outcomes: Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	50	55		65		70		75		80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10,378		10,378		10,378		10,378		10,378	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				3,938		4,017		4,097		4,179		4,263	
Outcomes: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,81	71,51		74,27		78,91		81,95		88,70		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nasional Perpustakaan													
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				150		150		150		150		150	
Outcomes: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	NA	10		10		10		10		10		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				448		448		448		448		448	
Outcomes: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	50	55		60		65		70		80		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				120		120		120		120		120	
Outcomes: Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23,377		23,377		23,377		23,377		23,377	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				343		343		343		343		343	
Outcome 1.1: Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	4 KKPD	1		2		3		4		4		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton)	15.794	9.000		11.000		13.000		15.000		17.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				31,305		31,305		31,305		31,305		31,305	
Outcome 1.1: Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	95.149**	95.650		96.000		97.000		98.000		99.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				151		151		151		151		151	
Outcome 1.1: Meningkatnya Produksi perikanan Budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.415.498**	1.450.000		1.482.000		1.485.000		1.490.000		1.493.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				706		706		706		706		706	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman havati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	87,30	89		92		95		98		100		Dinas Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				76		76		76		76		76	
Outcome 1.1: Meningkatnya konsumsi ikan oleh rnasvarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	51,08 **	53		55		56		57		58		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11,871		11,871		11,871		11,871		11,871	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2,422		2,422		2,422		2,422		2,422	
Outcome 1.1: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	25	27		30		32		35		40		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1,494		1,524		1,554		1,585		1,617	
Outcome 1.1: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	50	55		60		65		70		75		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				700		700		700		700		700	
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5	10		15		20		25		30		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				4,029		4,110		4,192		4,276		4,361	
Outcome 1.1: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	30	50		60		75		80		95		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32,941		32,941		32,941		32,941		32,941	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pernakan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5,435		5,435		5,435		5,435		5,435	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Pernakan	25	30		35		40		45		50		Dinas Pernakan
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				62,729		62,729		62,729		62,729		62,729	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3,857		3,857		3,857		3,857		3,857	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,5	1,53		2,31		3,09		3,88		4,68		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	0,5	2,13		3,21		4,31		5,42		6,54		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,01	0,05		0,07		0,10		0,12		0,15		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3,474		3,474		3,474		3,474		3,474	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	1.Persentase peningkatan prasarana ternak yang memenuhi standar	80	81		82		83		84		85		Dinas Petrernakan
	2.Persentase peningkatan jumlah UPH yang termanfaatkan	N.A	1,50		2,00		2,50		3,00		3,50		Dinas Petrernakan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				280		280		280		280		280	
Outcome 1.1: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Jumlah Kabupaten yang Menetapkan LP2B	8	8		9		9		10		10		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Persentase Peningkatan Jumlah UPH yang termanfaatka n (%)	N.A	1,50		2,00		2,50		3,00		3,50		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				846		846		846		846		846	
Outcome 1.1: Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan	100	100		100		100		100		100		Dinas Petrernakan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan kesehatan masyarakat veteriner	Menular Strategis (PHMS)												
	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	50	60		65		70		75		100		Dinas Peternakan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				600		600		600		600		600	
Outcome 1.1: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	75	75		75		75		75		75		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	75	75		75		75		75		75		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				9,444		9,633		9,826		10,022		10,222	
Outcome 1.1: Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	30	30		30		30		30		30		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				545		545		545		545		545	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				3,558		3,558		3,558		3,558		3,558	
Outcome 1.1: Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,87	0,88		0,89		0,90		0,92		0,95		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				77		77		77		77		77	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				6,851		6,988		7,128		7,270		7,416	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	35	40		40		40		40		40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
bidang kehutanan	2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	35	40		40		40		40		40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				500		500		500		500		500	
Outcome 1.1: Meningkatkan kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan (%)	NA	0,025		0,050		0,075		0,100		0,125		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15,113		15,113		15,113		15,113		15,113	
Outcome 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas ESDM
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN**				536		536		536		536		536	
Outcome 1.1: Meningkatkan tata kelola kegeologian	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/ Kota	NA	NA		NA		NA		NA		NA		Dinas ESDM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/ Kota	NA	NA		NA		NA		NA		NA		Dinas ESDM
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**				1,364		1,364		1,364		1,364		1,364	
Outcomes 1.1. meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	1. Luas WPR yang diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	NA	NA		NA		NA		NA		NA		Dinas ESDM
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				785		785		785		785		785	
Outcome 1.1: Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	19,05	25,19		28,26		31,33		34,4		37,47		Dinas ESDM
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				2,610		2,610		2,610		2,610		2,610	
Outcome 1.1: Meningkatnya cakupan Pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	96,35	97,81		98,54		99,27		100		100		Dinas ESDM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,017		13,017		13,017		13,017		13,017	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				25		25		25		25		25	
Outcome 1.1: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				25		25		25		25		25	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				632		632		632		632		632	
Outcome 1.1: Meningkatnya kelancaran	Persentase Stabilisasi Harga Barang	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				500		500		500		500		500	
Outcome 1.1: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	NA	60		65		70		85		90		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				526		536		547		558		569	
Outcome 1.1: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				60		60		60		60		60	
Outcome 1.1: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2,033		2,073		2,115		2,157		2,200	
Outcome 1.1: Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	50	55		60		65		68		70		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				50		50		50		50		50	
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				500		500		500		500		500	
Outcome 1.1: Meningkatnya pemanfaatan informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan perdagangan
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				500		500		500		500		500	
Outcome 1.1: Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100	90		93		95		97		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				2,749		2,804		2,860		2,917		2,975	
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transrnigrasi yang difasilitasi pembangunanny a	100	90		93		95		97		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				1,127		1,150		1,173		1,196		1,220	
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembanganny a	95,45	96		97		98		99		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				105,536		105,536		105,536		105,536		105,536	Sekretariat Daerah/Biro Umum
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Sekretariat Daerah/Biro Umum
Outcomes 1.2:	Persentase pelayanan terhadap KDH,	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah/Biro Umum

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	WKDH dan Sekretariat Daerah												
	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan dan sekretariat daerah	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah/Biro Umum
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				1,093		1,093		1,093		1,093		1,093	Sekretariat Daerah/Biro Organisasi
Outcomes: Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Nilai)	30	34		38		42		46		50		
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1,062		1,062		1,062		1,062		1,062	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				11,988		12,228		12,472		12,722		12,976	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				1,015		1,015		1,015		1,015		1,015	Sekretariat Daerah/Biro Hukum
Outcomes: Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100		100		100		100		100		
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				854		854		854		854		854	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100		100		100		100		100		
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				5,527		5,638		5,751		5,866		5,983	Sekretariat Daerah/Biro PBJ
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	73.18	80		85		90		95		100		
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				249		249		249		249		249	Sekretariat Daerah/Biro Ekonomi
Outcomes: Meningkatnya kualitas kebijakan administari pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.02 SEKRETARIAT DPRD													
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				88,678		88,678		88,678		88,678		88,678	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Sekretariat DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				88,503		88,503		88,503		88,503		88,503	Sekretariat DPRD
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.01 PERENCANAAN													
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				17,247		17,247		17,247		17,247		17,247	
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3,519		3,519		3,519		3,519		3,519	Bapperida
Outcomes: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100		100		100		100		100		Bapperida
	2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3,945		3,945		3,945		3,945		3,945	Bapperida
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100		100		100		100		100		Bapperida
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.02 KEUANGAN													
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				21,843		21,843		21,843		21,843		21,843	Badan Keuangan Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Keuangan Daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1,754,292		1,511,510		1,571,897		2,114,098		2,011,619	Badan Keuangan Daerah
Outcomes: 1. Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase pelayanan dokumen penatausahaan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya pembinaan keuangan kabupaten/kota	Persentase fasilitasi penyediaan dokumen anggaran kabupaten/kota sesuai ketentuan perundangan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				107,302		107,302		107,302		107,302		107,302	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4,575		4,575		4,575		4,575		4,575	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Outcomes: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap												Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				22,750		22,750		22,750		22,750		22,750	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Outcomes: 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	36,27	37		38		40		45		50		Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN													
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10,125		10,125		10,125		10,125		10,125	Badan Kepegawaian Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3,685		3,685		3,685		3,685		3,685	Badan Kepegawaian Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah
2.Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	65		75		80		85		90		Badan Kepegawaian Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	50	65		75		80		85		90		Badan Kepegawaian Daerah
4.Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Meningkatkan Kualitas Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN	85	90		100		100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				16,205		16,205		16,205		16,205		16,205	BPSDM
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		BPSDM
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				13,888		13,888		13,888		13,888		13,888	BPSDM
Outcomes: 1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	50	65		75		80		85		90		BPSDM
2.Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		BPSDM

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	50	65		75		80		85		90		BPSDM
4. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	50	65		75		80		85		90		BPSDM
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1,815		1,815		1,815		1,815		1,815	Bapperida
Outcomes: 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100		100		100		100		100		Bapperida
2. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				200		200		200		200		200	Bapperida
Outcomes: 1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100		Bapperida
2. Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
4. Meningkatkan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100	100		100		100		100		100		Bapperida
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN													
5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6,361		6,361		6,361		6,361		6,361	Badan Pengelola Perbatasan
Outcome 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Pengelola Perbatasan
5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	Badan Pengelola Perbatasan
Outcomes: 1.Meningkatnya Koordinasi Fasilitasi pemanfaatan kawasan perbatasan	1.Cakupan koordinasi, faslitasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Meningkatnya Pengamanan Batas Wilayah	1.Cakupan Layanan Batas Wilayah Negara	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				9,839		9,839		9,839		9,839		9,839	Badan Penghubung
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Penghubung
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				1,553		1,553		1,553		1,553		1,553	Badan Penghubung
Outcomes:	1.Persentase peningkatan cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	100	100		100		100		100		100		Badan Penghubung
	2.Persentase peningkatan pembinaan masyarakat	100	100		100		100		100		100		Badan Penghubung
	3.Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas promosi daerah	100	100		100		100		100		100		Badan Penghubung

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14,977		14,977		14,977		14,977		14,977	Inpektorat Daerah
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Inpektorat Daerah
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				11,876		11,876		11,876		11,876		11,876	Inpektorat Daerah
Outcomes: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Objek Pemeriksaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	100	100		100		100		100		100		Inpektorat Daerah
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				5,500		5,500		5,500		5,500		5,500	Inpektorat Daerah
Outcomes: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi	100	100		100		100		100		100		Inpektorat Daerah
	2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.09	3.17		3.22		3.25		3.27		3.30	3.09	Inpektorat Daerah

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6,053		6,053		6,053		6,053		6,053	Badan Kesbangpol
Outcome 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Capaian nilai SAKIP PD	CC	B		B		BB		BB		A		Badan Kesbangpol
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2,700		2,700		2,700		2,700		2,700	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				6,782		6,918		7,056		7,198		7,342	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				358		358		358		358		358	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				475		475		475		475		475	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1,180		1,180		1,180		1,180		1,180	Badan Kesbangpol
Outcomes: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penentuan target keberhasilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah dapat diterjemahkan secara operasional dan terukur. Untuk itu, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen utama dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dalam RPJMD ini merupakan hasil seleksi dari berbagai indikator yang tersedia dan dipilih secara cermat untuk merepresentasikan aspek kunci dari misi Gubernur. Pemilihan IKU tidak hanya mempertimbangkan dimensi strategis dan relevansinya terhadap program prioritas daerah, tetapi juga memperhatikan keterukuran, ketersediaan data, serta keselarasan dengan indikator Nasional (RPJMN) maupun Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setiap IKU dikaitkan langsung dengan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD dan memiliki target tahunan yang realistis selama periode perencanaan lima tahun. Dengan demikian, IKU menjadi alat ukur kinerja yang konkret dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab amanat pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi: **"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan."**

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKD mencerminkan capaian yang ingin diraih dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Penyusunan target IKD dilakukan secara sistematis dan berbasis data, dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya (*baseline*), sumber daya yang tersedia, serta tantangan dan potensi wilayah.

Target-target yang ditetapkan melalui IKD juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD dan menjadi dasar evaluasi kinerja Kepala Daerah setiap tahunnya, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut disusun agar selaras dengan arah kebijakan Nasional, target Pembangunan Daerah, serta prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dengan penetapan IKD yang tepat dan terukur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pijakan kuat untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) berlaku untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Adapun tahun 2030 merupakan tahun transisi, yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode selanjutnya.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB per kapita	(Rp Juta)	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85-25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	N.A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
3	Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	2,46	1,31-1,34	1,36-1,41	1,40-1,48	1,45-1,55	1,50-1,62	1,55-1,70
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
5	Rasio Gini	Indeks	0,316	0,309 - 0,315	0,302 - 0,308	0,295 - 0,301	0,288 - 0,295	0,281 - 0,287	0,274 - 0,280
6	Kontribusi PDRB Provinsi	%	N.A	0,62	0,6285	0,6370	0,6455	0,6540	0,6625
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
9	Indeks Modal Manusia	poin	0,48	0,487	0,493	0,500	0,506	0,513	0,519
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	53,27	61,82	63,19	64,57	69,07	70,26	71,45
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	75,00	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,86
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2,10-2,79	2,00 – 2,74
13	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	N.A	67,04	67,86	68,68	69,5	70,32	71,14
14	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,10	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	12,49	11,85	11,22	10,58	9,94	9,30	8,67
3	Cakupan Layanan Air Minum Layak	%	88,55	88,75	88,95	89,15	89,35	89,55	89,75
4	Cakupan Layanan Air Minum Aman	%	N.A	19.05	21.24	23.43	25.62	27.81	30.00
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	N.A	34,36	37,42	40,924	44,206	47,48	50,77
6	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50
7	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	2,50	4,88	7,38	9,75	12,13	14,50
8	Persentase Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	5,00	9,25	13,5	17,75	22,00	26,25
9	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	NA	15,00	19,25	23,50	27,75	32,00	36,25
10	Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	34,27	34,27	38,38	39,01	40,67	41,12	41,77
11	Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	%	19,85	19,85	20,55	21,30	22,14	23,08	23,85
12	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	131,85	186,87	185,48	184,09	182,70	181,32	179,93
13	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp.Miliar	80,32	79,51	78,70	77,89	77,08	76,27	75,45
14	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	NA	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	75,00	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Indeks Kemahalan Konstruksi	Poin	93,58	92,78	92,22	91,67	91,11	90,56	89,99
17	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
18	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh	211,22	216,02	220,82	225,62	230,42	235,22	240,02
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,44	1,43	1,41	1,39	1,37	1,36
20	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	122,00	124,00	126,00	128,00	130,00	132,00	134,00
21	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Indeks Trantibum	Angka	N.A	100	100	100	100	100	100
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Per Kapita	Rp, Juta	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85-25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
2	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	86,17	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,11	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 - 19,36	18,12-18,74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
6	Indeks Gini		0,316	0,3283 - 0,3218	0,324 - 0,3211	0,3211- 0,3204	0,3175 - 0,3197	0,3140 - 0,3190	0,3104 - 0,3183
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2,10-2,79	2,00 – 2,74
8	Indeks Modal Manusia/IPM	Poin	67,39	0,47	0,463	0,456	0,449	0,51	0,52
9	Proporsi jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) pada Level Provinsi	%	N,A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
10	Inklusi Keuangan	%	N,A	92,07	92,41	92,76	93,11	93,45	93,80
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	N,A	60,1 - 60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11
14	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	58,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi	%	N.A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
17	Proporsi jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) pada Level provinsi	%	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
19	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT	%	22,00	26,00	27,00	28,00	30,00	35,00	40,00
20	Tingkat Digitalisasi Koperasi	%	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	60,00
21	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik	%	77,81	77,63	75,00	77,00	80,00	81,00	85,00
23	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
25	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	37	33,1	31,9	30,7	29,5	28,38	27,1
26	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8,02	8,16	8,31	8,45	8,59	8,73	8,88
27	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	N,A	13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
28	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
29	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
30	Indeks SPM Pendidikan	%	58,35%	100	100	100	100	100	100
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	%	N.A	28,42	30,62	32,81	35,01	37,21	39,40
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	84,25	86,46-86,51	86,87-86,94	87,28-87,37	87,69-87,80	88,10-88,23	88,51-88,67
33	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	54,18-54,22	51,09-51,11	51,65-51,69	52,22-52,28	52,78-52,86	53,34-53,45	67,34-67,45
34	Angka Kematian Ibu	Per 100,000 KH	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00	93,00	91,00
35	Angka Kematian Balita	(Per 1000 KH)	11	10	9	8	7	6	5
36	Angka Kematian Bayi	Per 1,000 KH	7,85	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
37	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Rata-Rata Anak	2,71	2,70	2,67	2,63	2,60	2,56	2,53
38	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	56	59	68	72	77	81	85
39	Kapasitas air baku	M3/Detik	N.A	0,04	0,44	0,85	1,25	1,66	2,07
40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	N.A	10,53	10,60	10,68	10,76	10,85	10,92
41	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	%	95	96	97	98	99	100	100
III ASPEK DAYA SAING									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,46	1,31	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
2	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	8,49	8,52	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	N.A	1,35	1,48	1,61	1,74	1,87	2,01
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,50	78,60	79,70	80,80	81,90	83,00	84,10
5	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	N.A	73,63	74,45	75,27	76,09	76,91	77,73
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,10	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00
7	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	N.A	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
8	Indeks Ekonomi Biru (IBEL)	Indeks	N.A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
9	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
10	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
11	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	%	N.A	2,36	2,48	2,60	2,72	2,84	2,96
12	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	Poin	N.A	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
13	Indeks Masyarakat Digital	Poin	42,32	47,21	52,10	56,99	61,88	66,77	71,66
14	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	%	N.A	11,49	11,21	10,93	10,65	10,37	10,09
15	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	N.A	46,09	46,111	46,132	46,153	46,174	46,195
16	Persentase desa mandiri	%	1,78	2,42	3,06	3,69	4,33	4,97	5,61
17	Return on Aset (ROA) BUMD	%	N.A	1,04	1,22	1,39	1,57	1,74	1,92
18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	26,68	27*	28,4	29,8	31,2	32,6	34,0
19	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-37,52	-34,56	-31,60	-28,64	-25,68	-22,72	-19,76
20	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,21	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Tingkat Inflasi	%	N.A	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	N.A	28,68	31,72	34,76	37,80	40,84	43,88
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	Rp	N.A	0,72	1,04	1,36	1,68	2,00	2,32
24	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	%	N.A	562363,86	782933,43	1003503,00	1224072,57	1444642,14	1665211,71
25	Total Kredit/PDRB	%	N.A	36,3	38,3	40,4	42,4	44,5	46,5
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	N.A	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,63	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	84,00
3	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	%	N.A	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,87	4,40	4,43	4,46	4,49	4,52	4,10
5	Indeks Pemerintah Digital	Poin	N.A		1,70	1,70	1,90	1,90	2,00
6	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,56	3,66	3,73	3,80	3,87	3,94	4,00
7	Indeks kepatuhan Pelayanan Publik	Skor	77,85	79,89	82,08	85,39	89,79	95,25	98,5
8	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Level	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82
9	Indeks Integritas Nasional	Poin	N.A	65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	N.A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
11	Indeks Demokrasi Provinsi	Level	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12
12	Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya	%	N.A	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
13	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80	80	85	90	95	100	100
15	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27	3,30
16	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N.A	15,00	16,5	18,00	19,5	21,00	22,5
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,86	70,12	70,93	71,75	72,56	73,38	74,19
20	Rasio Konektivitas	Poin	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
21	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
22	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
23	Indeks Keamanan Informasi	Level	479,00	479,00	480,00	482,00	483,00	485,00	487,00
24	Nilai Sakip Pemerintah Provinsi	Skor	63,68	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,05
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	N.A	13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,02	8,61-8,62	8,49	8,38	8,27	8,15	8,04
3	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
4	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
5	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	58,35	100	100	100	100	100	100
6	Iklim keamanan satuan pendidik	%							
	- SMA		71,31	71,81	72,31	72,81	73,31	73,81	74,31
	- SMK		69,38	69,78	70,28	70,78	71,28	71,78	72,28
	- SLB		69,01	69,51	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01
7	Iklim kebhinekaan	%							
	- SMA		75,31	75,81	76,31	76,81	77,31	77,81	78,31
	- SMK		73,01	73,51	74,01	74,51	75,01	75,51	76,01
	- SLB		6781,00	68,31	68,81	69,31	69,81	70,31	70,81
8	Iklim Inklusivitas	%							
	- SMA		58,67	59,17	59,67	60,17	60,67	61,17	61,67
	- SMK		56,86	57,36	57,86	58,36	58,86	59,36	59,86
	- SLB		65,20	65,70	66,20	66,70	67,20	67,70	68,20
9	Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	%	94,49	94,99	95,49	95,99	96,49	96,99	97,49
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	%	75,92	76,42	76,92	77,42	77,92	78,42	78,92
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas	%	54,35	54,85	55,35	55,85	56,35	56,85	57,35
II	URUSAN KESEHATAN								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM								
1	Indeks Layanan Infrastruktur KePUan	Poin	7,65	17,65	27,65	37,65	47,65	57,65	67,65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								
1	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
V	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase pencapaian SPM Ketenteraman,ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan dalam setahun	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pencegahan daerah rawan kebakaran yang terpetakan dalam setahun	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
VI	URUSAN SOSIAL								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial								
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya.	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	%	88,32	90	90	90	90	90	90
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN TENAGA KERJA								
1	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang di tempatkan secara prosedural	%	78,73	85,00	88,00	90,00	93,00	95,00	96,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan Norma Kerja	%	50,00	51,28	54,49	57,69	60,90	64,10	67,31
II	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,77	94,03	94,29	94,55	94,82	95,09	95,36
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
III	URUSAN PANGAN								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
IV	URUSAN PERTANAHAN								
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi	Poin	36,9	41,9	46,9	51,9	56,9	61,9	66,9
V	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	75,00	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,86
VI	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Identitas Kependudukan	Persen	97,42	98,1	98,35	98,50	98,55	98,60	98,65
2.	Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Persen	81,57	82%	83%	84%	85%	85,5	86%
3	Jumlah Perjanjian Kerjasama Penggunaan Data Kependudukan	Jumlah	0	2	4	5	7	8	10
VII	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Indeks Desa	Nilai	0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72
VIII	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	59,20	60,90	62,60	64,30	66,00	67,70	69,40
IX	URUSAN PERHUBUNGAN								
1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	2,658	2,671	2,699	2,712	2,740	2,753	2,781
2	Rasio Konektivitas Kab/kota	Rasio	0,337	0,341	0,343	0,348	0,353	0,358	0,363
X	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	Indikator Baru	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2	Persentase Badan Publik (PD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang Informatif	%	53,66	57,00	62,00	67,00	72,00	77,00	77,00
3	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	Indikator Baru	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Cakupan pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	Indikator Baru	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	70,00
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor/Nilai	3,87/N.A	3,87/N.A	3,89/1,7	3,91/1,7	3,95/1,9	4,0/1,9	4,1/2
6	Presentase OPD yang dilayani Akses Internet Terintegrasi oleh Dinas Kominfo	%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah aplikasi layanan publik yang terintegrasi (SPLP)	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
8	Jumlah PD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Jumlah PD	0,00	0,00	12,00	24,00	31,00	41,00	41,00
9	Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan pusat data Pemerintah Provinsi NTT	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
10	Jumlah Area Blankspot yang telah diintervensi	Jumlah Desa	Indikator Baru	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Kominfo Yang bertalenta Digital	Jumlah orang	Indikator Baru	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
12	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi	Jumlah Layanan	Indikator Baru	0,00	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00
XI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	75,48	75,49	75,50	75,51	75,52	75,53	75,54
XII	URUSAN PENANAMAN MODAL								
1	Persentase realisasi Investasi	%	67,36	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
XIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kreativitas Pemuda Milenial serta Pengembangan Wirausaha Muda dengan Data Terpilah Gender	% (1000 Wirausaha per Tahun/6000 Target Akhir)	2796	17%	33%	50%	67%	83%	100%
2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Olahraga Prestasi dan Paralymphik	Medali (%)	101 (126%)	65 (81%)	68 (85%)	71 (89%)	74 (92%)	77 (96%)	80 (100%)
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	Cabang Olahraga (%)	15 (54%)	16 (57%)	20 (71%)	28 (100%)	28 (100%)	28 (100%)	28 (100%)
4	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	(%)	100	100	100	100	100	100	100
XIV	URUSAN STATISTIK								
1	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
2	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
3	Tingkat Pemenuhan data	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	sektoral								
XV	URUSAN PERSANDIAN								
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKAMI)	%	23,00	38,00	40,00	43,00	46,00	50,00	50,00
2	Nilai <i>Cyber Security Maturity</i> (CSM)	Level	318,00	320,00	340,00	350,00	360,00	380,00	380,00
3	Presentase PD Yang memiliki keamanan Informasi	%	Indikator baru	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
XVI	URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	53,69	54,89	56,09	57,29	58,49	59,69	60,89
XVII	URUSAN PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	62,62	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50
XVIII	URUSAN KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	60,19	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
C	URUSAN PILIHAN								
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	89	89	90	90	91	91	92
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan NTPi)	Indeks	100	100	101	101	102	102	103
II	URUSAN PARIWISATA								
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	7,77	7,77	7,80	7,84	7,90	7,95	8,00
2	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	%	0,72	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
III	URUSAN PERTANIAN								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
IV	URUSAN KEHUTANAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Tutupan Lahan Kritis	%	1,49	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,58
2	Persentase Luasan Hutan Yang Dimanfaatkan Untuk Perhutanan Sosial	%	15,72	16,58	17,44	18,30	19,16	20,02	20,88
V	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
2	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50
VI	URUSAN PERDAGANGAN								
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,80	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,50
2	Persentase Nilai Ekspor Non Migas	%	95,27	96,00	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25
VII	URUSAN PERINDUSTRIAN								
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
2	Persentase Pelaku IKM Yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi	%	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
VIII	URUSAN TRANSMIGRASI								
1	Persentase Pengembangan Dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi	%	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71
D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
I	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH								
1	Indeks Kematangan Organisasi	%	30	30	34	38	42	46	50
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	88,5	89,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
3	Persentase penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah Pengampu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Perangkat Daerah/Biro/RSD Provinsi dengan Nilai SAKIP minimal BB "SANGAT BAIK"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	73,18	75,00	78,00	82,00	85,00	90,00	95,00
6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	36,92	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	97,00
7	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Area Pengadaan Barang/Jasa	Skor	56,7	78,00	78,00	80,00	80,00	85,00	90,00
8	Persentase Capaian Peraturan Perundang-Undangan	%	147,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Capaian Penegakan Hukum dan Pengelolaan HAM	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II UNSUR SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III UNSUR PERENCANAAN									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
IV UNSUR KEUANGAN									
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	NA	65,518	68,279	71,040	73,801	76,562	79,325
3	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	30,21	30,5	31	31,5	32	32,5	33
V UNSUR KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	%	81,19	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
VI UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Dasar	%	88,33	90,08	91,83	93,58	95,33	97,08	98,83
2	Indeks Profesionalitas ASN	%	88,00	89,75	91,50	93,25	95,00	96,75	98,50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dimensi Pengembangan Kompetensi Manajerial								
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	%	80,16	81,91	83,66	85,41	87,16	88,91	90,66
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Teknis	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
6	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Fungsional	%	65,67	67,42	69,17	70,92	72,67	74,42	76,17
VII	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Proporsi Hasil Riset Dan Inovasi Sebagai Input Dalam Perumusan Kebijakan	%	N.A	77,36	83,01	88,68	94,33	100,00	100,00
VIII	UNSUR PENGAWASAN								
1	Indeks Kapabilitas APIP	Poin	3,09	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27
IX	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyesuaian dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan berbagai kebijakan pusat maupun tertib administrasi yang diatur dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah (*top – down*) dan bawah-atas (*bottom – up*).

Dokumen RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi transformasi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju provinsi yang mandiri dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis SDA (Sumber Daya Alam) terbarukan, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Bab ini merangkum komitmen kolektif dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan sebagai dokumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan Kota, dunia usaha serta masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTT berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
5. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi NTT berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Provinsi NTT.

6. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTT pada Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT mulai Tahun 2025 sampai dengan 2030.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
8. Mekanisme pelaporan hasil evaluasi dan publikasi akan dilakukan melalui sistem e-monev dan dilaporkan serta dipublikasikan secara reguler kepada Kepala Daerah dan masyarakat.
9. Memperhatikan manajemen risiko secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5.2 PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan program/kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi, namun Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam kemampuan penganggaran seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta (*public-private partnership*) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.
4. Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi NTT harus mempertimbangkan kondisi bauran geografi-biologi-ekonomi-politik-sosial-budaya (geobioekopolsosbud) sebagai daerah kepulauan dan daerah perbatasan dengan memanfaatkan semua mitra potensi untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
6. Indikator-Indikator Kinerja Utama Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan sebuah rancangan masa depan Nusa Tenggara Timur yang harus dicapai bersama dan sebagai tantangan besar bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan masyarakat yang bermartabat.
7. Kunci pembangunan terletak pada inovasi yang berbasis pada iptek dengan langkah-langkah terobosan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengutamakan nilai-nilai moralitas, hukum, partisipasi, efektivitas, efisiensi, adil (inklusif), transparan, dan akuntabel.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bapperida	
Kabid PPEPD Bapperida	
Kabid PPM Bapperida	
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida	
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida	
Kabid Rida Bapperida	

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	